



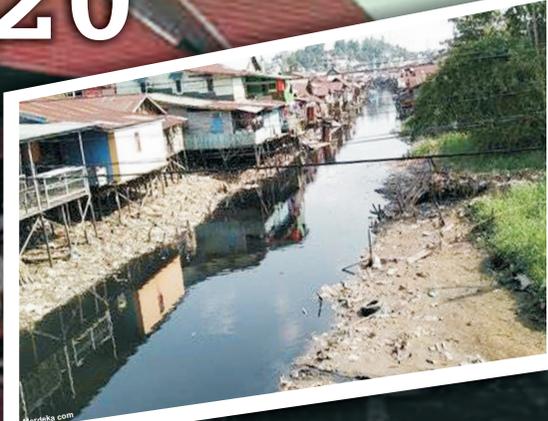
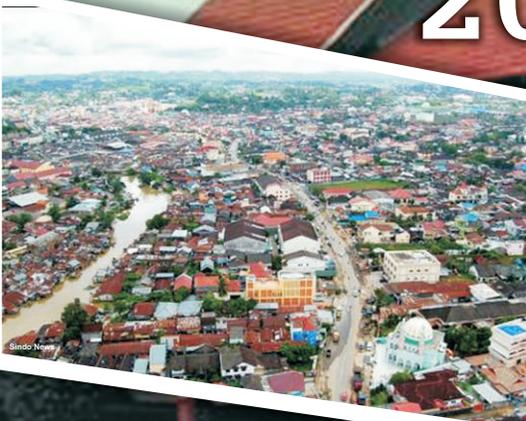
P E M E R I N T A H
P R O V I N S I K A L I M A N T A N T I M U R

Draft Analisis KETIMPANGAN WILAYAH

SEMESTER 1

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Tahun
2020



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, karena atas perkenan-Nya Draft Buku Analisis Ketimpangan Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 pada Kegiatan Pengembangan Data dan Analisis Sektor Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2020 dapat diselesaikan.

Perbedaan tingkat kuantitas dan kualitas sumber daya alam yang dimiliki suatu wilayah serta perbedaan kuantitas dan kualitas infrastruktur yang dimiliki wilayah menjadi salah satu penyebab timbulnya ketimpangan atau kesenjangan antar daerah. Tingkat perbedaan pendapatan masyarakat selain berasal dari faktor internal seperti SDM (Sumber Daya Manusia) juga disebabkan dari faktor eksternal yakni ketimpangan pembangunan antar wilayah.

Tujuan dari pembuatan buku ini adalah untuk mengetahui pola dan struktur ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur. Dari buku ini mengetahui pengaruh tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu juga untuk mengetahui pengaruh variable PDRB, PAD, DAU dan IPM terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur.

Semoga buku ini dapat menjadi bahan evaluasi dan tolok ukur dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan menjadi bahan perbaikan untuk masa yang akan datang.

Samarinda, Juli 2020

Plt. Kepala Bappeda Prov. Kaltim

Drs. H. Iman Hidayat, M.Si.
NIP. 19620724 198603 1 014

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	2
BAB II GAMBARAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	3
2.1 Kondisi Geografis dan Administrasi.....	3
2.2 Kependudukan.....	5
2.3 Kondisi Perekonomian	7
2.3.1 Pertumbuhan Ekonomi	7
2.3.2 Kemiskinan.....	12
2.3.3 Ketenagakerjaan	14
2.3.4 Pembangunan Manusia	16
BAB III ANALISIS KETIMPANGAN KALIMANTAN TIMUR	19
3.1 Ketimpangan Pendapatan	19
3.2 Kondisi Ketimpangan Antar Wilayah (Indeks Williamson)	27
BAB IV KETIMPANGAN DALAM TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	33
a) Jumlah Daerah Tertinggal yang Terentaskan	33
b) Jumlah Desa Tertinggal	33
c) Jumlah Desa Mandiri.....	34
d) Pertumbuhan Ekonomi di Daerah Tertinggal.....	34
e) Persentase Penduduk Miskin di Daerah Tertinggal	34
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	35
DAFTAR PUSTAKA	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peta Kalimantan Timur.....	3
Gambar 2.2	Laju Pertumbuhan PDRB Kalimantan Timur, 2014-2019	8
Gambar 2.3	IPM dan Pertumbuhan IPM Kalimantan Timur	17
Gambar 3.1	Indeks Gini Indonesia Menurut Tipe Wilayah, Tahun 2015-2019.....	22
Gambar 3.2	Indeks Gini Kalimantan Timur, Tahun 2016-2019.....	23
Gambar 3.3	Perkembangan Persentase Pengeluaran Kelompok 40 Persen Terendah, Maret 2017-September 2019	25
Gambar 3.4	Perkembangan Penduduk Miskin menurut Kriteria, September 2018-September 2019.....	26
Gambar 3.6	Ketimpangan Antar Wilayah di Indonesia (Indeks Williamson).....	28
Gambar 3.7	Ketimpangan Antar Wilayah Regional Kalimantan (Indeks Williamson)..	30
Gambar 3.8	Ketimpangan Antar Wilayah Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur (Indeks Williamson).....	31

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kondisi Iklim Kalimantan Timur, 2019	4
Tabel 2.2	Daerah Administrasi Kalimantan Timur, 2019.....	5
Tabel 2.3	Statistik Kependudukan Provinsi Kalimantan Timur, 2019	6
Tabel 2.4	Perkembangan PDRB Kalimantan Timur, 2016 – 2019	7
Tabel 2.5	Kondisi Perekonomian Kalimantan Timur menurut Lapangan Usaha, 2019	8
Tabel 2.6	Perekonomian Kalimantan Timur dari Sisi Pengeluaran, 2019	11
Tabel 2.7	PDRB Kalimantan Timur menurut Kabupaten/Kota, 2019.....	12
Tabel 2.8	Statistik Kemiskinan Kalimantan Timur menurut Kabupaten/Kota, 2019	13
Tabel 2.9	Statistik Ketenagakerjaan Kalimantan Timur, 2018-2019.....	14
Tabel 2.10	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kalimantan Timur menurut Kabupaten/Kota, 2018-2019	15
Tabel 2.11	Upah Minimum Kerja (UMK) menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, 2019	16
Tabel 2.12	Statistik Pembangunan Manusia Kalimantan Timur, 2019	18
Tabel 3.1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita (Ribu Rupiah)	29
Tabel 3.2	Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita (Ribu Rupiah) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.....	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi dalam suatu wilayah diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang dapat dinikmati oleh masyarakat dalam wilayah tersebut tanpa terkecuali. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi seharusnya berjalan selaras, sehingga terdapat peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat pada seluruh lapisan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai dengan pemerataan ekonomi, hanya akan memperlebar jurang pemisah antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya (masyarakat yang kaya dan yang miskin) atau antara wilayah yang satu dengan yang lain (wilayah maju dan wilayah tertinggal).

Ketimpangan yang tinggi dalam suatu wilayah/negara berpotensi dalam menciptakan berbagai permasalahan sosial-ekonomi, misalnya kecemburuan sosial, kerawanan disintegrasi wilayah dan disparitas ekonomi yang makin lebar dan tajam. Selain itu, dampak lain yang dapat terjadi adalah adanya peningkatan migrasi dari daerah yang miskin ke daerah yang maju. Jika penduduk migran tersebut tidak dapat segera terserap dalam lapangan pekerjaan agar mereka dapat bekerja produktif, maka dapat berakibat kepada tingkat kesejahteraannya yang menjadi rendah. Pada akhirnya, kondisi tersebut dapat menciptakan kecemburuan serta ketidakpuasan masyarakat, yang dapat berpotensi pada peningkatan tindakan kriminal, konflik antar masyarakat, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Ketimpangan antar wilayah juga turut mewarnai dinamika pembangunan manusia di Indonesia. Rentang luas wilayah Indonesia yang cukup besar serta tidak meratanya pembangunan menyebabkan ketimpangan terjadi, baik antara perkotaan dengan perdesaan, antarprovinsi, antarkabupaten, serta antara kota dengan kabupaten. Dalam tujuan pembangunan wilayah hingga tahun 2024, Pemerintah Pusat terus berupaya mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sumatera. Salah satu sasaran yang harus dicapai dalam lima tahun mendatang adalah mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan mendorong percepatan pembangunan di Kawasan Timur Indonesia.

Isu strategis yang juga menjadi fokus RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020-2024 adalah ketimpangan antar provinsi dalam wilayah pulau. Pulau Kalimantan tercatat memiliki ketimpangan yang cukup tinggi. Ukuran ketimpangan merupakan salah satu indikator capaian kebijakan distribusi pembangunan. Dengan demikian, tingkat ketimpangan yang tinggi memberikan indikasi bahwa hasil pembangunan belum merata dirasakan masyarakat di suatu wilayah.

Selain itu, isu ketimpangan juga termasuk kedalam salah satu hal yang disoroti dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals*, yaitu pada tujuan kesepuluh. Tujuan ini menyatakan bahwa pada tahun 2030 kesenjangan atau ketimpangan di dalam dan antar Negara semakin berkurang. Kesenjangan yang terjadi dapat mengancam pembangunan sosial maupun ekonomi dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif perlu diwujudkan untuk memastikan tersedianya kesempatan yang sama bagi setiap individu, sekaligus mampu menurunkan kesenjangan pendapatan.

Perekonomian Kalimantan Timur merupakan penyumbang hampir 50 persen dari total nilai tambah yang dihasilkan berbagai aktivitas ekonomi di wilayah Pulau Kalimantan. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang diciptakan kurang didukung dengan pemerataan hasil pembangunan untuk seluruh kabupaten/kota. Beberapa wilayah di Kalimantan Timur masih sulit untuk diakses karena keterbatasan infrastruktur transportasi. Sulitnya akses masuk ke suatu wilayah, menyebabkan mobilitas barang dan jasa di daerah tersebut menjadi terhambat. Hal ini dapat mengakibatkan wilayah yang sulit diakses tersebut menjadi relatif lebih tertinggal dibandingkan wilayah lainnya yang memiliki infrastruktur transportasi lebih baik. Kondisi tersebut menciptakan ketimpangan wilayah antar kabupaten/kota seperti yang terjadi di Provinsi Kalimantan Timur.

Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari 10 kabupaten/kota dengan karakteristik ekonomi berbasis sumber daya alam, yaitu sektor pertanian serta sektor pertambangan dan penggalian. Meskipun terdapat kesamaan dalam hal karakteristik ekonominya, yaitu berbasis sumber daya alam, namun besaran nilai tambah yang dihasilkan cukup berbeda. Hal ini dapat dilihat dari nilai kontribusi PDRB kabupaten/kota terhadap total PDRB Provinsi Kalimantan Timur. Kontribusi PDRB tahun 2018 yang cukup tinggi dihasilkan oleh aktivitas ekonomi di beberapa kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara (25,46 persen), Kabupaten Kutai Timur (19,9 persen), dan Kota Balikpapan (15,09 persen). Sedangkan aktivitas ekonomi di Kabupaten Mahakam Ulu hanya berkontribusi sebesar 0,40 persen terhadap total PDRB Provinsi Kalimantan Timur.

Selain disparitas ekonomi, terdapat pula disparitas jumlah penduduk antar kabupaten/kota di Kalimantan Timur. Hal ini terlihat dari persebaran jumlah penduduk yang belum merata di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Dari total penduduk Kalimantan Timur sebanyak 3,6 juta jiwa, hanya sekitar 26 ribu jiwa yang berada di Kabupaten Mahakam Ulu (atau sekitar 0,70 persen). Perbedaan jumlah penduduk ini juga yang memberikan dampak terhadap capaian kinerja pertumbuhan pembangunan di masing-masing kabupaten/kota di Kalimantan Timur.

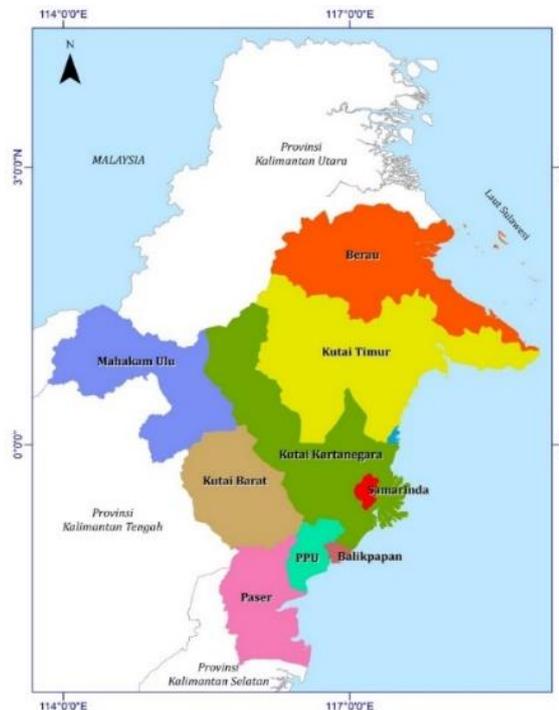
1.2 Tujuan

Tujuan dari penulisan analisis ini antara lain:

1. Tersedianya analisis tingkat ketimpangan pendapatan Provinsi Kalimantan Timur
2. Tersedianya analisis mengenai kondisi ketimpangan antar wilayah di Provinsi Kalimantan Timur
3. Mengetahui tipologi ketimpangan wilayah di Provinsi Kalimantan Timur
4. Mengetahui faktor yang berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Kalimantan Timur
5. Mengetahui strategi yang dapat digunakan dapat mengatasi ketimpangan di Provinsi Kalimantan Timur
6. Memberikan rekomendasi mengenai upaya untuk mengatasi ketimpangan wilayah di Provinsi Kalimantan Timur

BAB II GAMBARAN UMUM KALIMANTAN TIMUR

2.1 Kondisi Geografis dan Administrasi



Gambar 2.1 Peta Kalimantan Timur

Kalimantan Timur adalah Provinsi terluas ketiga di Pulau Kalimantan setelah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, dan terluas keempat di Indonesia yaitu seluas 127.346,92 km². Adapun secara geografis, batas-batas wilayah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

- Utara : Provinsi Kalimantan Utara dan Negara Malaysia
- Selatan : Provinsi Kalimantan Selatan
- Barat : Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Tengah
- Timur : Laut Sulawesi dan Selat Makassar

Kondisi astronomis Kalimantan Timur pada wilayah Indonesia terletak antara 2° 33' LU - 2° 25' LS dan 113° 44' BT - 119° 00' BT. Mengacu pada letak astronomis ini, Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi yang dilintasi garis khatulistiwa. Dengan posisi tersebut, secara umum wilayah Provinsi Kalimantan Timur merupakan kawasan tropis sehingga cuacanya sangat panas. Suhu di Kalimantan Timur berkisar 22 ° C hingga 37 ° C, dengan kelembaban udara rata-rata berkisar antara 74 – 86 persen. Secara umum, kondisi topografi di Kalimantan Timur berbukit-bukit dengan ketinggian berkisar antara 0 – 2.500 meter di atas permukaan air laut.

Tabel 2.1 Kondisi Iklim Kalimantan Timur, 2019

Uraian	Stasiun		
	Temindung - Samarinda	Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggian - Balikpapan	Kalimarau - Berau
(1)	(2)	(3)	(4)
Suhu (° C)			
minimum	22,0	21,7	19,2
rata-rata	29,6	27,7	27,1
maksimum	37,2	34,5	36,8
Kelembaban Udara (%)			
minimum	33,0	42,0	39,0
rata-rata	74,0	85,7	85,6
maksimum	100,0	100,0	100,0
Tekanan Udara (mb)	1 011,6	1 010,8	1 011,2
Kecepatan Angin (m/det)	3,9	4,0	2,6
Curah Hujan (mm ³)	152	197	144
Penyinaran Matahari (jam)	4	5	5

Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Kalimantan Timur

Pembagian daerah administrasi di Kalimantan Timur terdiri dari 7 kabupaten dan 3 kota. Kabupaten dengan wilayah terluas adalah Kutai Timur, mencapai 24,38 persen dari total luas wilayah Kalimantan Timur, sedangkan yang terkecil adalah Bontang yaitu hanya 0,13 persen dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Keseluruhan kabupaten/kota tersebut terdiri dari 103 kecamatan dan 1.038 desa/kelurahan. Kabupaten dengan jumlah desa/kelurahan terbanyak terdapat adalah Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu sebanyak 237 desa/kelurahan. Sementara itu, kabupaten dengan kecamatan terbanyak terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Timur, yaitu masing-masing sebanyak 18 kecamatan. Wilayah dengan jumlah kecamatan serta desa/kelurahan paling sedikit dibandingkan kabupaten/kota lainnya adalah Kota Bontang, yaitu hanya terdapat 3 kecamatan dan 15 desa/kelurahan.

Tabel 2.2 Daerah Administrasi Kalimantan Timur, 2019

Kabupaten/Kota	Ibukota	Luas (km ²)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Paser	Tanah Grogot	11 096,96	10	144
Kutai Barat	Sendawar	13 709,92	16	194
Kutai Kartanegara	Tenggarong	25 988,08	18	237
Kutai Timur	Sangata	31 051,71	18	141
Berau	Tanjung Redeb	21 735,19	13	110
Penajam Paser Utara	Penajam Paser Utara	2 923,73	4	54
Mahakam Ulu	Long Bagun	19 449,41	5	50
Balikpapan	Balikpapan	512,25	6	34
Samarinda	Samarinda	716,53	10	59
Bontang	Bontang	163,14	3	15
Kalimantan Timur	Samarinda	127 346,92	103	1 038

Sumber: Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 Tanggal 6 Mei 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 90 Tahun 2018 tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2018

2.2 Kependudukan

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk (SP) 2010, jumlah penduduk di Kalimantan Timur adalah sebanyak 3.047.479 jiwa. Hasil proyeksi menyebutkan bahwa pada tahun 2019, jumlah penduduk Kalimantan Timur adalah sebesar 3.721.389 jiwa. Dengan persentase penduduk laki-laki sebesar 52,42 persen, atau jumlahnya lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Jika dilihat persebarannya, jumlah penduduk paling banyak terdapat di Kota Samarinda, yaitu sebanyak 872.768 jiwa. Wilayah lain dengan jumlah penduduk yang cukup besar adalah Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu sebanyak 786.122 jiwa, dan Kota Balikpapan, sebanyak 655.178 jiwa.

Jika dibandingkan dengan tahun 2018, dimana jumlah penduduk adalah sebesar 3.648.835 jiwa, maka laju pertumbuhan penduduk di Kalimantan Timur tahun 2019 adalah sebesar 1,99 persen. Besaran pertumbuhan penduduk tersebut lebih kecil, dimana laju penduduk di tahun 2018 adalah sebesar 2,05 persen, atau terjadi perlambatan jumlah penduduk di tahun 2019. Laju pertumbuhan penduduk tercepat adalah di Kabupaten Kutai Timur yaitu sebesar 3,99 persen. Hal ini dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi di wilayah tersebut, dimana terdapat aktivitas pertambangan batubara dengan skala yang besar di Kabupaten Kutai Timur. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk yang paling rendah terjadi di Kutai Barat dan Mahakam Ulu, yaitu masing-masing hanya sebesar 0,41 persen dan 0,16 persen, atau hanya tumbuh di bawah 1 persen.

Wilayah dengan kepadatan penduduk terbesar adalah di Kota Balikpapan. Dimana tingkat kepadatan penduduk adalah sebesar 1.297,74 jiwa/km², yang artinya setiap 1 km² wilayah di Kota Balikpapan dihuni oleh sekitar 1.279 jiwa penduduk. Sedangkan wilayah dengan penduduk terjarang adalah di Mahakam Ulu yang angka kepadatan penduduknya hanya 1,36 jiwa/km². Secara umum, kepadatan penduduk di Kalimantan Timur adalah 29,80 jiwa/km², menggambarkan bahwa dengan luas wilayah

yang cukup besar, yaitu mencapai 128 ribu hektar, jumlah penduduk yang bermukim di wilayah Kalimantan Timur relatif sedikit.

Tingginya angka kepadatan penduduk di wilayah kota (Samarinda, Balikpapan, Bontang) disebabkan karena dengan luas wilayah yang terbatas dan perkotaan merupakan pusat bisnis atau pemerintahan. Sebagai pusat aktivitas ekonomi atau pemerintahan, maka wilayah perkotaan memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk melakukan migrasi ke kota.

Tabel 2.3 Statistik Kependudukan Provinsi Kalimantan Timur, 2019

Kabupaten/ Kota	Penduduk			Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	Pertumbuhan Penduduk 2018-2019 (%)
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Paser	151 533	134 361	285 894	26,31	2,11
Kutai Barat	78 086	69 934	148 020	10,83	0,29
Kutai Kartanegara	412 529	373 593	786 122	30,91	2,18
Kutai Timur	203 586	172 525	376 111	12,60	3,99
Berau	124 807	107 480	232 287	10,96	2,55
Penajam Paser Utara	84 018	76 894	160 912	55,56	0,96
Mahakam Ulu	14 111	12 264	26 375	1,36	0,11
Balikpapan	338 202	316 976	655 178	1 297,74	1,46
Samarinda	451 099	421 669	872 768	1 238,90	1,71
Bontang	92 912	84 810	177 722	1 111,37	2,02
Kalimantan Timur	1 950 883	1 770 506	3 721 389	29,80	1,99

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

2.3 Kondisi Perekonomian

2.3.1 Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator untuk mengukur capaian kinerja pembangunan ekonomi. Besaran PDRB mencerminkan seluruh nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam periode tertentu. Angka PDRB juga merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur capaian target dalam dokumen Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya tujuan kedelapan, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.

Tabel 2.4 Perkembangan PDRB Kalimantan Timur, 2016 – 2019

Uraian (1)	Tahun			
	2016 (2)	2017 (3)	2018* (4)	2019** (5)
PDRB adh Berlaku (Miliar Rp)	508 880,24	591 903,49	636 454,48	653 677,10
PDRB adh Konstan 2010 (Miliar Rp)	439 003,83	452 741,91	464 823,49	486 977,18
PDRB per Kapita adh Berlaku (Juta Rp)	145,34	165,55	174,43	175,65
PDRB per Kapita adh Konstan 2010 (Juta Rp)	125,39	126,63	127,39	130,86

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

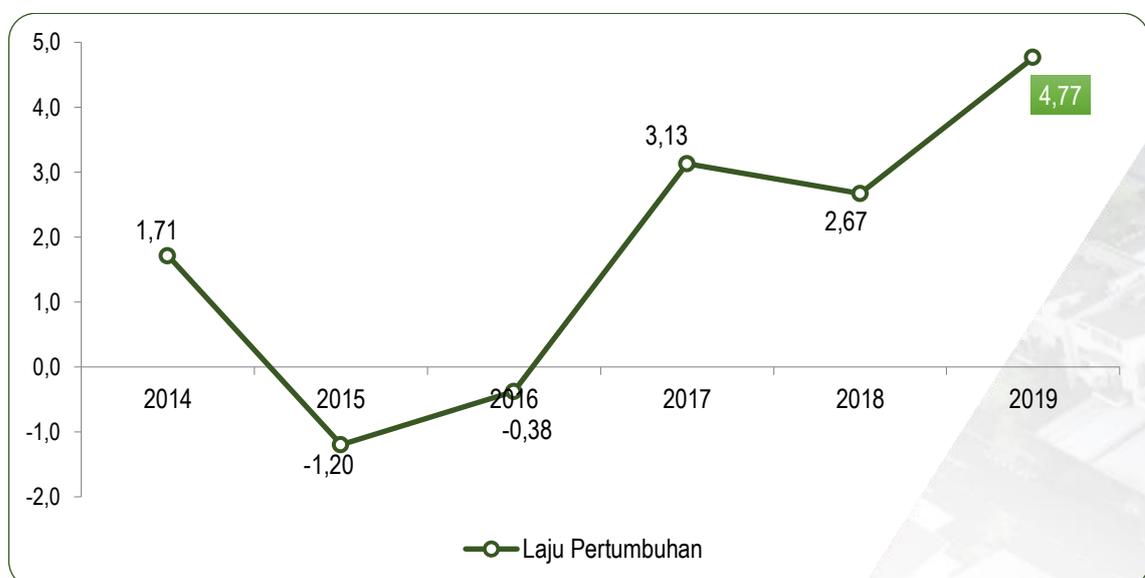
Keterangan :

* : Angka sementara

** : Angka sangat sementara

Pada tahun 2019, besaran PDRB Kalimantan Timur atas dasar harga berlaku sebesar Rp653,68 triliun, lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp636,45 triliun. Jika memperhitungkan jumlah penduduk, maka PDRB per kapita atas dasar harga berlaku tahun 2019 adalah sebesar Rp175,65 juta. Nilai tersebut juga mengalami kenaikan sebesar 0,44 persen dibandingkan PDRB per kapita tahun 2018, yang sebesar Rp174,43 juta.

Sementara itu, besaran laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur selama periode 2014-2019 cukup fluktuatif. Pada periode tahun 2014-2015 pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur mengalami perlambatan, bahkan di tahun 2015 dan 2016 mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif. Namun pada 2017 terdapat perbaikan ekonomi, dimana laju pertumbuhan Kalimantan Timur bernilai positif, sebesar 3,13 persen, walaupun kemudian sedikit melambat di tahun 2018 dengan laju pertumbuhan sebesar 2,67 persen, tetapi mengalami percepatan di tahun 2019 dengan pertumbuhan 4,77 persen.



Sumber: BPS Kalimantan Timur

Gambar 2.2 Laju Pertumbuhan PDRB Kalimantan Timur, 2014-2019

a. PDRB ADHB Kalimantan Timur menurut Lapangan Usaha

Pada tahun 2019, struktur perekonomian Kalimantan Timur menunjukkan bahwa perekonomian wilayah masih mengandalkan kekayaan sumber daya alam atau sektor primer. Hal ini dilihat dari dominasi lapangan usaha sektor Pertambangan dan Penggalian dengan besaran nominal PDRB sebesar Rp297,38 triliun. Diikuti dengan sektor Industri Pengolahan, yang utamanya ditopang oleh Industri Kilang Migas, dengan nominal sebesar Rp116,14 triliun. Kedua sektor secara bersama menguasai lebih dari 60 persen perekonomian Kalimantan Timur. Sektor Pertambangan dan Penggalian memberikan kontribusi sebesar 45,49 persen terhadap total penciptaan nilai tambah di Kalimantan Timur. Sementara itu, Sektor Industri Pengolahan memiliki peranan sebesar 17,77 persen.

Tabel 2.5 Kondisi Perekonomian Kalimantan Timur menurut Lapangan Usaha, 2019

Lapangan Usaha (1)	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (miliar Rupiah) (2)	Kontribusi PDRB (%)			Laju Pertumbuhan (%) (6)
		2017 (3)	2018* (4)	2019** (5)	
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	51 796,37	7,98	7,90	7,92	3,88
B. Pertambangan dan Penggalian	297 376,51	46,6	46,56	45,49	6,89
C. Industri Pengolahan	116 141,95	18,93	18,15	17,77	0,19
D. Pengadaan Listrik dan Gas	344,96	0,05	0,05	0,05	8,65
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	311,10	0,05	0,05	0,05	5,56
F. Konstruksi	59 347,18	7,92	8,51	9,08	5,62
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	38 675,38	5,41	5,58	5,92	5,20
H. Transportasi dan Pergudangan	24 008,70	3,59	3,61	3,67	2,11
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6 637,39	0,92	0,96	1,02	6,12
J. Informasi dan Komunikasi	8 708,38	1,25	1,26	1,33	6,86
K. Jasa Keuangan	10 226,17	1,53	1,53	1,56	3,03
L. Real Estate	5 832,18	0,88	0,88	0,89	2,12
M,N. Jasa Perusahaan	1 347,14	0,21	0,21	0,21	1,43
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	13 178,71	1,97	1,93	2,02	4,25
P. Jasa Pendidikan	10 940,26	1,53	1,59	1,67	4,64
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4 290,54	0,59	0,61	0,66	6,99

Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (miliar Rupiah)	Kontribusi PDRB (%)			Laju Pertumbuhan (%)
		2017	2018*	2019**	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
R,S,T,U. Jasa Lainnya	4 514,18	0,60	0,63	0,69	8,16
PDRB	653 677,10	100,00	100,00	100,00	4,77

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Keterangan :

* : Angka sementara

** : Angka sangat sementara

Percepatan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur pada tahun 2019 ini dipengaruhi oleh kinerja seluruh lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif. Pertambangan dan Penggalian sebagai lapangan usaha dominan bahkan mampu tumbuh sebesar 6,86 persen, sedangkan untuk Industri Pengolahan juga mengalami pertumbuhan sebesar 0,19 persen.

Penyumbang kontribusi PDRB tertinggi selanjutnya adalah sektor Konstruksi yakni sebesar 9,08 persen dan sektor Pertanian yaitu sebesar 7,92 persen, dengan laju pertumbuhan masing-masing sebesar 5,62 persen dan 3,88 persen. Selain itu, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor juga mengalami sedikit peningkatan kontribusi, dari 5,41 persen di tahun 2017 menjadi sebesar 5,92 persen di tahun 2019. Laju Pertumbuhan sektor ini juga mengalami pertumbuhan sebesar 5,20 persen.

Beberapa sektor di Kalimantan Timur mengalami pertumbuhan nilai tambah yang cukup tinggi, namun memiliki peranan yang relatif rendah. Beberapa sektor tersebut adalah Pengadaan Listrik dan Gas, yang tumbuh sebesar 8,65 persen; dan merupakan sektor dengan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2019; sektor Jasa Lainnya tumbuh sebesar 8,16 persen; sektor Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial tumbuh sebesar 6,99 persen; sektor Informasi dan Komunikasi tumbuh sebesar 6,86 persen; serta sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh sebesar 6,12 persen. Jika sektor-sektor tersebut dapat tumbuh cepat secara kontinyu, maka sektor-sektor tersebut memiliki potensi untuk menjadi sektor pendorong ekonomi yang memberikan kontribusi secara signifikan.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya pertumbuhan perekonomian Kalimantan Timur mengalami percepatan. Pada tahun 2018 besaran pertumbuhan sebesar 2,67 persen, sedangkan tahun 2019 mengalami kenaikan besaran pertumbuhan menjadi sebesar 4,77 persen. Jika dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi, sektor Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian merupakan sektor dengan andil sumber pertumbuhan yang tertinggi.

b. PDRB ADHB Kalimantan Timur menurut Pengeluaran

Sebagai suatu ekonomi yang mengandalkan kinerja ekspor dari komoditas primer, dinamika perekonomian Kalimantan Timur pada tahun 2019 sangat dipengaruhi oleh dinamika permintaan atas migas dan batubara dalam pasar global. Pada tahun 2019, peranan komponen ekspor luar negeri terhadap PDRB atas dasar harga berlaku mencapai 38,67 persen, dengan nominal PDRB sebesar Rp252,77 triliun. Jika dilihat dari volume ekspor, terjadi peningkatan kinerja ekspor luar negeri, dimana

komponen tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 9,02 persen. Di sisi lain, proporsi impor luar negeri Kalimantan Timur cenderung menurun. Pada tahun 2017, kontribusi PDRB impor sebesar 11,69 persen meningkat menjadi 12,70 persen di tahun 2018, kemudian menjadi 9,12 persen di tahun 2019. Pada tahun 2019 ini, pertumbuhan impor luar negeri mengalami kontraksi atau mengalami pertumbuhan negatif sebesar 25,46 persen.

Komponen yang juga cukup berperan dalam PDRB Pengeluaran adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), dengan kontribusi sebesar 28,72 persen, dengan nominal sebesar Rp187,71 triliun. Selain itu adalah Net Ekspor Antar Daerah dan Konsumsi Rumah Tangga, dengan kontribusi masing-masing sebesar 20,31 persen dan 16,79 persen. Adapun besaran nominal dari Net Ekspor Antar Daerah adalah sebesar Rp132,75 triliun dan Konsumsi Rumah Tangga sebesar Rp109,77 triliun.

Tabel 2.6 Perekonomian Kalimantan Timur dari Sisi Pengeluaran, 2019

Komponen (1)	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (miliar Rupiah) (2)	Kontribusi PDRB (%)			Laju Pertumbuhan (%) (6)
		2017 (3)	2018* (4)	2019** (5)	
Konsumsi Rumah Tangga	109 769,67	16,36	16,26	16,79	3,15
Konsumsi LNPRT	3 246,86	0,44	0,47	0,50	5,95
Konsumsi Pemerintah	26 338,93	3,65	3,73	4,03	9,97
PMTB	187 709,06	26,10	27,25	28,72	4,79
Perubahan Inventori	725,91	0,30	0,25	0,11	-
Ekspor Barang dan Jasa	252 772,20	41,57	41,60	38,67	9,02
Dikurangi Impor Barang dan Jasa	59 635,61	11,69	12,70	9,12	-25,46
Net Ekspor Antar Daerah	132 750,07	23,27	23,15	20,31	-23,67
PDRB	653 677,10	100,00	100,00	100,00	4,77

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Keterangan :

* : Angka sementara

** : Angka sangat sementara

c. PDRB ADHB Kalimantan Timur menurut Kabupaten/Kota

Penyumbang PDRB menurut kabupaten/kota tertinggi adalah dari Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp162,74 triliun atau 24,89 persen dari total PDRB Kalimantan Timur. Selanjutnya, kabupaten yang juga cukup besar dalam memberikan kontribusi untuk menciptakan nilai tambah Provinsi Kalimantan Timur adalah Kabupaten Kutai Timur sebesar Rp133,73 atau sekitar 20,45 persen. Sedangkan penyumbang PDRB terendah adalah dari Mahakam Ulu. Salah satu faktor yang menyebabkan adalah karena Kabupaten Mahakam Ulu merupakan kabupaten yang relatif masih baru sehingga relatif belum banyak terdapat aktivitas ekonomi. Selain itu, akses menuju kabupaten ini juga relatif sulit sehingga hal tersebut juga berdampak terhadap aktivitas ekonomi di wilayah tersebut.

Pada tahun 2019, hampir seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Timur mengalami pertumbuhan positif, kecuali Kota Bontang yang mengalami pertumbuhan negatif sebesar 2,18 persen. Kabupaten Kutai Timur menjadi kabupaten yang mengalami pertumbuhan tertinggi pada tahun 2019 yakni sebesar 7,97 persen.

Tabel 2.7 PDRB Kalimantan Timur menurut Kabupaten/Kota, 2019

Lapangan Usaha (1)	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (miliar Rupiah) (2)	Kontribusi PDRB (%)			Laju Pertumbuhan (%) (6)
		2017 (3)	2018* (4)	2019** (5)	
Paser	48 175,70	7,44	7,61	7,37	3,88
Kutai Barat	28 865,24	4,37	4,45	4,41	5,58
Kutai Kartanegara	162 739,38	25,26	25,54	24,89	3,77
Kutai Timur	133 725,07	20,36	20,15	20,45	7,97
Berau	39 050,66	6,04	5,94	5,97	5,55
PPU	9 087,47	1,44	1,40	1,39	2,52
Mahakam Ulu	2 718,25	0,40	0,40	0,42	5,44
Balikpapan	102 389,03	14,85	15,15	15,66	4,78
Samarinda	68 570,72	9,89	10,08	10,49	4,97
Bontang	58 479,36	9,97	9,30	8,94	(2,18)
Jumlah 10 Kab/Kota	653 800,88	100,00	100,00	100,00	4,51
Kalimantan Timur	653 677,10				4,77

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Keterangan :

* : Angka sementara

** : Angka sangat sementara

2.3.2 Kemiskinan

Kemiskinan masih menjadi salah satu isu pembangunan yang cukup krusial. Pengentasan kemiskinan merupakan salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) serta ditempatkan sebagai tujuan pertama, yaitu mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun. Pada tahun 2019, angka kemiskinan di Kalimantan Timur adalah sebesar 5,94 persen. Besaran angka tersebut lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya, yang sebesar 6,03 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengurangan angka kemiskinan di Kalimantan Timur. Jika dipetakan menurut kabupaten/kota, pada tahun 2019, tingkat kemiskinan paling tinggi terdapat di Kabupaten Mahakam Ulu, yaitu sebesar 11,25 persen, sedangkan paling rendah terdapat di Kota Balikpapan yakni sebesar 2,42 persen.

Indeks kedalaman kemiskinan (P_1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh jarak garis kemiskinan dari rata-rata pengeluaran penduduk penduduk miskin. Pada tahun 2019, nilai

indeks kedalaman kemiskinan Kalimantan Timur sebesar 0,95 naik dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 0.85.

Indeks keparahan kemiskinan (P_2) merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Pada tahun 2019, nilai indeks keparahan kemiskinan Kalimantan Timur mengalami sedikit kenaikan menjadi 0,21 dari 0,20 pada tahun sebelumnya.

Tabel 2.8 Statistik Kemiskinan Kalimantan Timur menurut Kabupaten/Kota, 2019

Kabupaten/Kota	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahahan Kemiskinan (P2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Paser	477 400	25,45	8,95	1,57	0,40
Kutai Barat	542 393	13,45	9,09	1,48	0,41
Kutai Kartanegara	503 968	56,34	7,20	0,95	0,19
Kutai Timur	569 449	35,31	9,48	1,90	0,55
Berau	526 615	11,62	5,04	0,66	0,12
PPU	466 918	11,52	7,18	1,00	0,28
Mahakam Ulu	588 756	3,19	11,25	1,94	0,55
Balikpapan	572 108	15,78	2,42	0,26	0,06
Samarinda	658 307	39,80	4,59	0,57	0,11
Bontang	582 188	7,47	4,22	0,42	0,08
Kalimantan Timur	609 155	219,92	5,94	0,91	0,21
2018	574 704	218,90	6,03	0,85	0,20

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, Survei Sosial Ekonomi Nasional

2.3.3 Ketenagakerjaan

Kelompok penduduk berumur 15 tahun ke atas merupakan kelompok penduduk yang produktif dan memiliki potensial secara ekonomi, sehingga disebut penduduk usia kerja. Penduduk usia kerja di Kalimantan Timur pada tahun 2019 tercatat sebanyak lebih dari 2,7 juta jiwa. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, terdapat peningkatan penduduk usia kerja sebesar 2,49 persen.

Pada tahun 2019, angkatan kerja di Kalimantan Timur sebesar 1,81 juta penduduk. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 1,73 juta penduduk. Dari sejumlah angkatan kerja tersebut proporsi penduduk yang bekerja ada sebesar 93,9 persen, dan sisanya adalah pengangguran. Pada kelompok bukan angkatan kerja, mengurus rumah tangga memiliki proporsi yang paling besar yaitu mencapai 63 persen.

Nilai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menggambarkan persentase jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Tahun 2019, TPAK Kalimantan Timur sebesar 66,44 persen. Dari kelompok angkatan kerja tersebut, sebanyak 1,7 juta jiwa aktif bekerja dan sisanya 110,6 ribu jiwa sebagai pengangguran. Menurut kabupaten/kota, TPAK tertinggi berada di Kabupaten Mahakam Ulu yakni 70,55 persen penduduk Kabupaten Mahakam Ulu tergolong pada kelompok angkatan kerja.

Tabel 2.9 Statistik Ketenagakerjaan Kalimantan Timur, 2018-2019

Uraian (1)	2018 (2)	2019 (3)
Penduduk Usia 15 +	2 665 909	2 732 343
Angkatan Kerja	1 732 598	1 815 382
a. Bekerja	1 618 285	1 704 808
b. Pengangguran	114 313	110 574
Bukan Angkatan Kerja	933 311	916 961
a. Sekolah	238 947	245 422
b. Mengurus RT	593 523	577 722
c. Lainnya	100 841	93 817

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus

Terkait ketenagakerjaan, indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi salah satu indikator dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ke 8 (delapan) sebagai ukuran bagi ketersediaan pekerjaan yang layak serta penciptaan pertumbuhan ekonomi. TPT menggambarkan angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar tenaga kerja di suatu wilayah. Pada tahun 2019, TPT Kalimantan Timur sebesar 6,07 artinya dari 100 orang angkatan kerja ada sekitar 7 orang yang tidak memiliki pekerjaan atau menganggur. Jika dirinci menurut kabupaten/kota, terdapat variasi besaran nilai TPT antar wilayah kabupaten/kota. Pada tahun 2019, nilai TPT tertinggi adalah di Kota Bontang yaitu mencapai 9,19 persen. Sedangkan TPT terendah berada di Kabupaten Mahakam Ulu yaitu sebesar 3,69 persen.

Tabel 2.10 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kalimantan Timur menurut Kabupaten/Kota, 2018-2019

Kabupaten/Kota (1)	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	
	2018 (2)	2019 (3)	2018 (4)	2019 (5)
Paser	5,00	4,55	67,22	66,43
Kutai Barat	4,86	5,08	72,65	67,29
Kutai Kartanegara	5,96	5,98	64,36	66,07
Kutai Timur	5,93	5,53	69,40	69,23

Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	
	2018	2019	2018	2019
	(1)	(2)	(4)	(5)
Berau	5,62	5,08	67,85	67,11
Penajam Paser Utara	4,76	6,26	64,81	64,45
Mahakam Ulu	4,17	3,69	79,00	70,55
Balikpapan	9,52	7,29	64,33	66,13
Samarinda	6,16	5,87	61,32	65,40
Bontang	9,61	9,19	65,16	68,36
Kalimantan Timur	6,60	6,09	64,99	66,44

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus

Pada tahun 2019, besaran Upah Minimum Kerja (UMK) di Kalimantan Timur adalah Rp2.747.561,-. Jika dirinci menurut kabupaten/kota, seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Timur memiliki besaran UMK yang lebih tinggi dibandingkan dengan besaran nilai UMK Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten dengan besaran UMK tertinggi adalah Kabupaten Berau, yaitu sebesar Rp3.120.996,-. Sedangkan kabupaten dengan besaran UMK terendah di Kalimantan Timur adalah Kabupaten Paser, yaitu sebesar Rp2.787.920,-, namun demikian besaran nilai UMK Paser tersebut masih berada di atas nilai UMK Provinsi Kalimantan Timur.

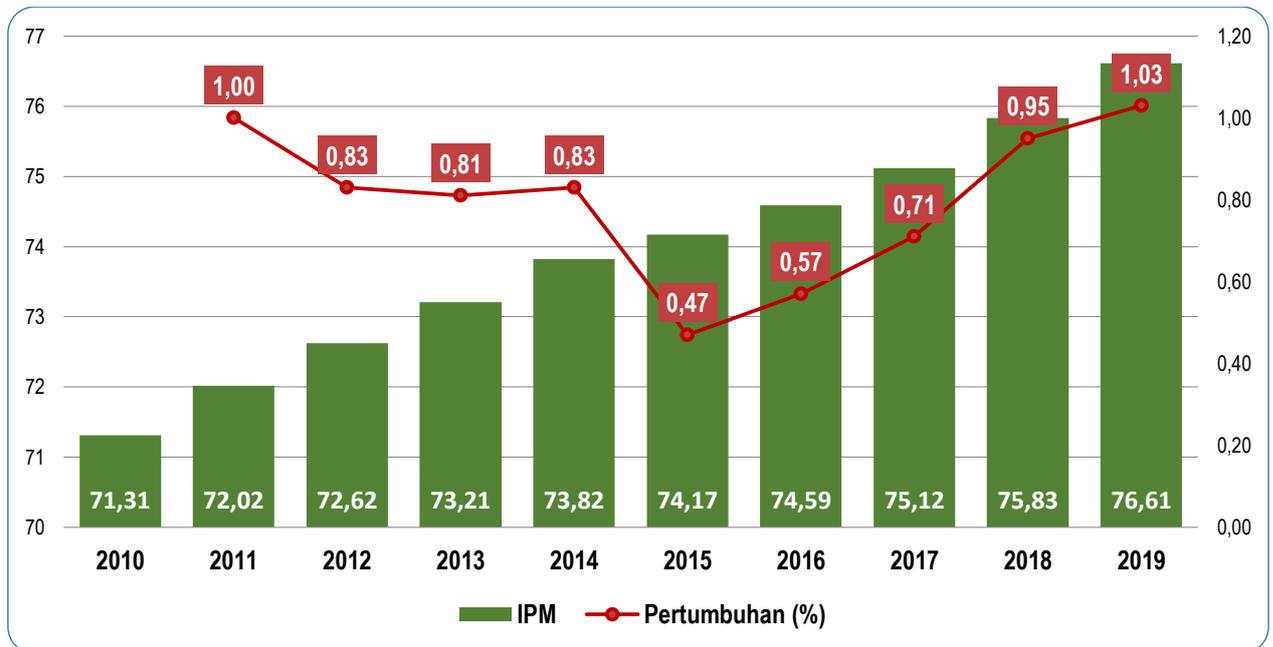
Tabel 2.11 Upah Minimum Kerja (UMK) menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, 2019

Kabupaten/Kota	Upah Minimum Kerja (Rp)
(1)	(2)
Paser	2 787 920
Kutai Barat	3 050 000
Kutai Kartanegara	2 930 304
Kutai Timur	2 893 833
Berau	3 120 996
Penajam Paser Utara	3 100 000
Mahakam Ulu ^{*)}	...
Balikpapan	2 868 083
Samarinda	2 868 083
Bontang	2 933 099
Kalimantan Timur	2 747 561

*) Data Mahakam Ulu masih bergabung dengan Kutai Barat

2.4 Pembangunan Manusia

Kemajuan hasil pembangunan manusia secara umum dapat ditunjukkan dengan melihat perkembangan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Angka IPM mencerminkan capaian kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Selama kurun waktu sembilan tahun terakhir, perkembangan angka IPM di Kalimantan Timur terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, IPM Kalimantan Timur tercatat sebesar 76,61 dan termasuk ke dalam kategori tinggi bersama 2 provinsi lainnya yaitu DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Angka IPM 2019 ini meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 75,83, dengan pertumbuhan sebesar 1,03 persen.



Sumber: BPS Kalimantan Timur

Gambar 2.3 IPM dan Pertumbuhan IPM Kalimantan Timur

Jika dirinci menurut komponennya, terdapat peningkatan pada setiap komponen penyusun IPM Kalimantan Timur. Pada tahun 2019, aspek kesehatan penduduk, yang ditunjukkan oleh indikator Usia Harapan Hidup, mencapai usia 74,22 tahun. Variabel pendidikan yang diwakili oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, angka Harapan Lama Sekolah tercatat sebesar 13,69 tahun. Angka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan angka tahun 2018, yaitu 13,67 tahun. Peningkatan juga terlihat pada indikator pendidikan lainnya, yaitu Rata-rata Lama Sekolah, yang meningkat dari 9,48 tahun pada tahun 2018 menjadi sebesar 9,70 tahun pada 2019.

Sementara itu, aspek kondisi ekonomi masyarakat diukur dengan indikator pengeluaran per kapita disesuaikan. Pada tahun 2019, pengeluaran per kapita disesuaikan Kalimantan Timur adalah sebesar 12,36 juta rupiah/tahun. Angka tersebut lebih besar jika dibandingkan tahun 2018, dimana pendapatan per kapita adalah sebesar 11,92 juta rupiah/tahun.

Berdasarkan kabupaten/kota, angka IPM yang tinggi di Kalimantan Timur adalah untuk wilayah-wilayah kota. Dimana wilayah dengan IPM tertinggi adalah Kota Samarinda, yaitu sebesar 80,09,

disusul Kota Balikpapan sebesar 80,11 dan Kota Bontang sebesar 80,09 persen. Ketiga kota tersebut mengalami perubahan status menjadi “sangat tinggi”, jika dibandingkan dengan tahun kemarin. Ketiga kota tersebut juga memiliki IPM yang berada di atas angka IPM Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan angka IPM terendah adalah untuk Kabupaten Mahakam Ulu sebesar 67,58.

Tabel 2.12 Statistik Pembangunan Manusia Kalimantan Timur, 2019

Kabupaten/Kota	IPM	Umur Harapan Hidup (tahun)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (ribu/orang/tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Paser	72,29	72,52	13,00	8,54	10 767
Kutai Barat	71,63	72,79	12,89	8,34	10 338
Kutai Kartanegara	73,78	72,21	13,58	9,10	11 152
Kutai Timur	73,49	73,03	12,78	9,18	11 196
Berau	74,88	71,94	13,31	9,25	12 726
PPU	71,64	71,30	12,55	8,16	11 750
Mahakam Ulu	67,58	71,90	12,50	7,89	8 008
Balikpapan	80,11	74,41	14,13	10,67	14 791
Samarinda	80,20	74,17	14,70	10,47	14 613
Bontang	80,09	74,18	12,90	10,73	16 843
Kalimantan Timur	76,61	74,22	13,69	9,70	12 359
2018	75,83	73,96	13,67	9,48	11 917

Sumber: BPS Kalimantan Timur

BAB III

ANALISIS KETIMPANGAN KALIMANTAN TIMUR

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, pada tahun 2019 penduduk Kalimantan Timur telah mencapai 3,72 juta jiwa dengan capaian nilai IPM sebesar 76,61. Jika dibandingkan dengan provinsi lainnya, maka nilai IPM Kalimantan Timur tersebut termasuk kedalam kategori “Tinggi” dan berada di atas nilai IPM Nasional, yang sebesar 71,92. Hal ini menunjukkan potensi Kalimantan Timur menjadi suatu wilayah yang memiliki keunggulan terkait pembangunan manusia jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia.

Selain itu, dari sisi ekonomi, penciptaan kue ekonomi yang ditunjukkan oleh kue PDRB Kalimantan Timur juga cukup besar. Pada tahun 2019, PDRB Kalimantan Timur mencapai Rp653,68 triliun dan menyumbang lebih dari separuh ekonomi di regional Kalimantan. Peningkatan kesejahteraan juga ditunjukkan oleh besaran angka kemiskinan di Kalimantan Timur, yaitu sebesar 5,94 persen, dan angka tersebut masih berada di bawah angka nasional (sebesar 9,41 persen). Hal ini juga menunjukkan bahwa terdapat capaian kinerja yang cukup baik dari aspek ekonomi dan sosial wilayah Kalimantan Timur.

Dengan capaian-capaian tersebut, masih terdapat beberapa permasalahan pembangunan yang masih perlu diselesaikan, seperti masalah ketimpangan, seperti ketimpangan gender. Pengukuran kondisi ketimpangan gender, salah satunya dilakukan melalui indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan juga Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Pada tahun 2019, nilai IPG Provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar 85,98 dan nilai IDG sebesar 57,53 (tahun 2018). Hal ini menunjukkan bahwa walaupun gambaran pembangunan manusia secara umum di Kalimantan Timur sudah cukup baik, namun masih terdapat masih terdapat perbedaan capaian kualitas pembangunan laki-laki dibandingkan capaian pembangunan manusia perempuan di wilayah Kalimantan Timur.

Selain terdapat permasalahan ketimpangan gender, masih terdapat masalah ketimpangan lainnya dalam pembangunan wilayah di Kalimantan Timur, seperti ketimpangan pendapatan dan ketimpangan antar wilayah kabupaten/kota di Kalimantan Timur.

3.1 Ketimpangan Pendapatan

Terdapat pergeseran paradigma terkait dengan pembangunan wilayah. Dari pandangan bahwa kegiatan pembangunan yang dilakukan lebih berorientasi kepada penciptaan pertumbuhan ekonomi (peningkatan nilai PDRB) saja, menjadi pandangan baru dimana pembangunan yang berorientasi kepada penciptaan kualitas hidup (*quality of life*) yang lebih baik. Salah satu indikator perubahan paradigma tersebut adalah terdapat gerakan pelestarian lingkungan hidup dalam setiap upaya pembangunan. Gerakan tersebut bertujuan untuk menciptakan kesinambungan dalam pembangunan (*sustainable development*), sehingga hasil pembangunan tidak saja dinikmati oleh generasi saat ini, akan tetapi juga dapat dinikmati oleh generasi selanjutnya.

Dengan munculnya paradigma *sustainable development*, aspek lain yang juga perlu diperhatikan dalam pembangunan adalah menjamin bahwa hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat pada

masa sekarang. Hal ini berarti bahwa jika pembangunan menciptakan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah, sebagai satu indikator capaian pembangunan, perlu diperhatikan pula apakah manfaat dari pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, jika terdapat peningkatan output ekonomi suatu wilayah seharusnya dibarengi dengan adanya pembagian porsi pendapatan yang merata diantara para pelaku ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan memperbesar kapasitas ekonomi suatu negara. Dengan semakin meningkatnya kapasitas ekonomi, maka diharapkan akan tercipta *trickle down effect*, yaitu manfaat positif dari pertumbuhan ekonomi juga akan diterima oleh masyarakat yang relatif berpendapatan lebih rendah, sehingga kesejahteraan seluruh masyarakat akan meningkat. Namun, kondisi tersebut seringkali tidak dapat tercapai.

Beberapa studi menunjukkan bahwa ketimpangan di suatu wilayah memberikan dampak terhadap kondisi makroekonomi, khususnya pertumbuhan ekonomi. Banerjee dan Duflo (2003) menyatakan bahwa ketimpangan merupakan faktor penghambat pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut, Berg dan Ostry (2011) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di suatu wilayah sangat erat kaitannya dengan kondisi ketimpangan yang relatif rendah di wilayah tersebut. Bahkan studi yang dilakukan Dabla-Norris dkk. (2015) menyatakan bahwa distribusi pendapatan merupakan faktor penting bagi pertumbuhan ekonomi. Jika proporsi pendapatan dari kelompok berpendapatan tinggi meningkat, maka terjadi penurunan besaran persentasi pertumbuhan ekonomi pada jangka menengah. Sebaliknya, jika terdapat peningkatan proporsi pendapatan dari kelompok terendah, maka besaran pertumbuhan ekonomi akan meningkat.

Ketimpangan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi melalui beberapa mekanisme (Jain-Chandra, 2016), diantaranya adalah melalui aspek ekonomi politik. Ketimpangan pendapatan menyebabkan peningkatan instabilitas politik, akibatnya dapat menghambat kegiatan investasi dan pertumbuhan ekonomi, serta menyebabkan menurunnya kemampuan pemerintah dalam merespon *shock* yang terjadi di wilayahnya. Selain itu, ketimpangan juga menimbulkan keterbatasan untuk memperoleh kredit yang berakibat rendahnya aktivitas investasi bagi pembentukan modal SDM dan juga kesehatan, serta menghambat kesempatan berusaha. Pada beberapa studi, ketimpangan juga ditemui sebagai salah satu penyebab terjadinya krisis dan instabilitas ekonomi dan keuangan. Sebagai contoh, ketimpangan menciptakan tekanan politis untuk melakukan kebijakan pembiayaan perumahan bersubsidi, yang berpotensi berdampak kepada terjadinya krisis keuangan.

Selain ketimpangan, isu pembangunan lainnya adalah kemiskinan. Dalam paradigma *Sustainable Development*, pandangan bahwa hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat mengandung arti bahwa tidak ada yang tertinggal atau "*to leave no one left behind*", artinya bahwa kemiskinan harus dihindari. Secara bersama-sama, indikator kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan merupakan tiga ukuran yang dapat menjelaskan mengenai capaian kinerja pembangunan suatu negara. Harapannya adalah pertumbuhan ekonomi yang tercipta dapat mengurangi kemiskinan, dan pada akhirnya dapat memperbaiki distribusi pendapatan suatu wilayah.

Analisis hubungan antara ketiga hal tersebut telah menjadi bahan perdebatan yang panjang dan sangat menarik terutama pada pemilihan strategi pembangunan ekonomi dalam upaya pengentasan kemiskinan. Pilihan pertama, apakah lebih mendahulukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan mengesampingkan pemerataan distribusi pendapatan. Kedua, apakah lebih mengutamakan distribusi

pendapatan yang lebih merata dengan mengorbankan pertumbuhan ekonomi, atau yang ketiga, apakah lebih mengutamakan distribusi pendapatan yang lebih merata tanpa harus mengorbankan pertumbuhan ekonomi.

Pendapatan per kapita yang tinggi di suatu wilayah tidak menjamin semua masyarakat hidup makmur. Oleh sebab itu diperlukan suatu alat ukur yang dapat melihat apakah seluruh pendapatan di suatu wilayah telah terdistribusi secara merata. Untuk mengukur kondisi ketimpangan pendapatan suatu wilayah digunakan Indeks Gini (*Rasio gini*). Indeks Gini adalah ukuran ketimpangan yang paling umum digunakan. Indeks gini mengukur derajat ketimpangan distribusi pendapatan suatu wilayah untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat kesenjangan sosial di masyarakat. Jika rasio gini mendekati 0, berarti distribusi pendapatan semakin merata. Sebaliknya, jika mendekati 1, berarti distribusi pendapatan semakin tidak merata.

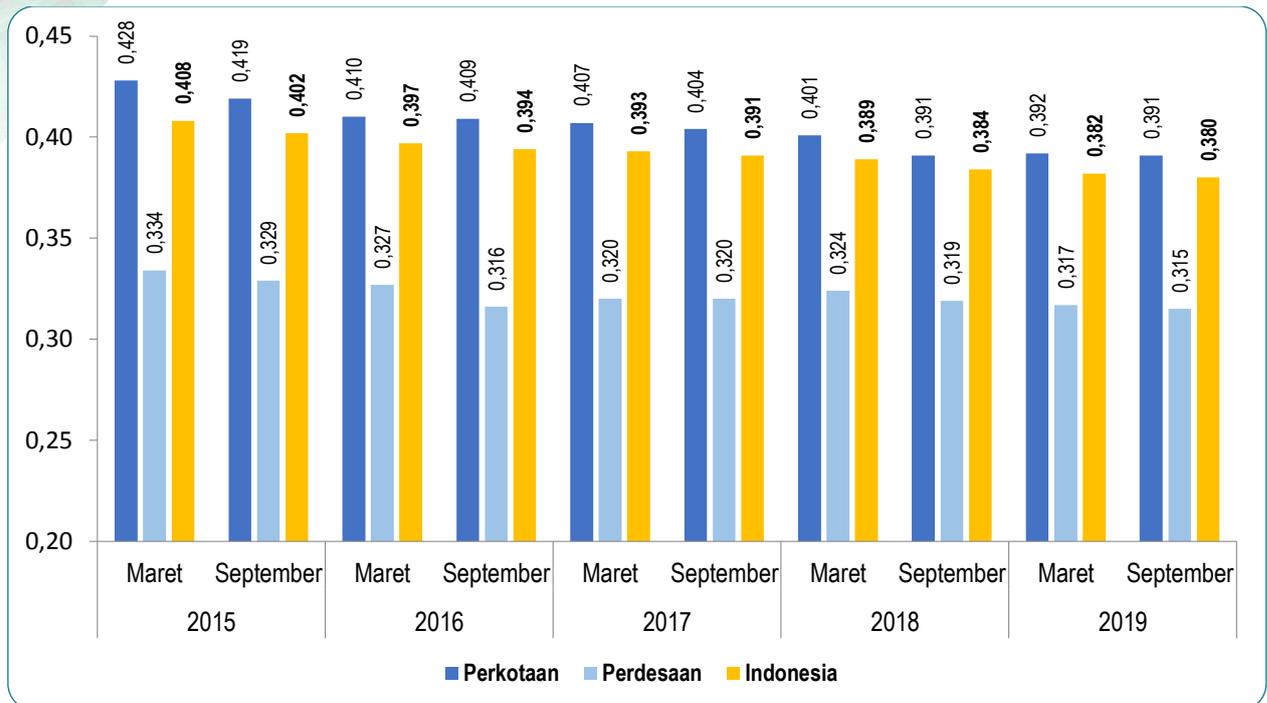
Ketimpangan Pendapatan di Indonesia

Permasalahan utama dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia saat ini terkait dengan adanya fakta bahwa pertumbuhan ekonomi tidak tersebar secara merata di seluruh wilayah Indonesia, ini dibuktikan dengan Indeks Gini nasional yang sebesar 0,382 pada tahun 2019. Meskipun terdapat penurunan Gini sebesar 0,007 poin dibandingkan dengan Indeks Gini Maret 2018 yang sebesar 0,389, namun, besaran nilai Indeks tersebut masih menempatkan Indonesia pada negara dengan ketimpangan sedang menurut klasifikasi Bank Dunia. Penurunan indeks gini mengindikasikan perbaikan ketimpangan pendapatan, dalam hal ini terdapat sedikit penurunan ketimpangan pendapatan di Indonesia dari tahun 2018 ke tahun 2019. Tren indeks gini dari tahun ke tahun Indonesia ini diharapkan akan semakin menurun kedepannya sehingga membawa Indonesia pada jajaran negara dengan tingkat ketimpangan rendah.

Pada Maret 2019, provinsi yang mempunyai nilai Indeks Gini tertinggi tercatat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu sebesar 0,423 sementara yang terendah tercatat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Indeks Gini sebesar 0,269. Secara mengejutkan, provinsi terbaru Indonesia, yang *notabene* adalah pecahan Provinsi Kalimantan Timur, yakni Kalimantan Utara mempunyai Indeks Gini yang jauh lebih rendah dari Provinsi Induknya. Kalimantan Utara tercatat mempunyai Indeks Gini sebesar 0,295, yang merupakan indeks terendah kedua di Indonesia. Dibanding dengan Indeks Gini nasional yang sebesar 0,382, Kalimantan Timur termasuk provinsi dengan Indeks Gini yang lebih rendah. Indeks Gini Provinsi Kalimantan Timur pada Maret 2019 mencapai 0,330. Bila mengacu pada kategori Indeks Gini yang disebutkan sebelumnya, maka Indeks Gini Provinsi Kalimantan Timur termasuk dalam kategori sedang.

Sejak tahun 2015, ketimpangan di Indonesia tercatat mengalami penurunan walaupun lambat. Penurunan tingkat ketimpangan ini menurut BPS disebabkan oleh kenaikan yang lebih cepat pada pengeluaran perkapita per bulan untuk penduduk kelompok 40 persen terbawah dibandingkan penduduk kelompok 40 persen menengah dan kelompok 20 persen teratas. Jika dipilah menurut wilayah, yaitu perkotaan dan perdesaan, terlihat bahwa penurunan ketimpangan di daerah perkotaan lebih cepat dibandingkan di wilayah perdesaan. Gambar 3.1 menunjukkan bahwa selama tahun 2015-2019, kecepatan penurunan ketimpangan di daerah perdesaan lebih lambat dibanding perkotaan. Jika di perkotaan selama kurun waktu tersebut Indeks Gini mampu turun sebesar 0,037 poin, namun di

wilayah perdesaan hanya mampu turun 0,019 poin. Namun demikian, secara nilai terlihat bahwa penduduk di wilayah perkotaan memiliki kondisi ketimpangan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk di wilayah perdesaan.



Sumber: BPS Kalimantan Timur

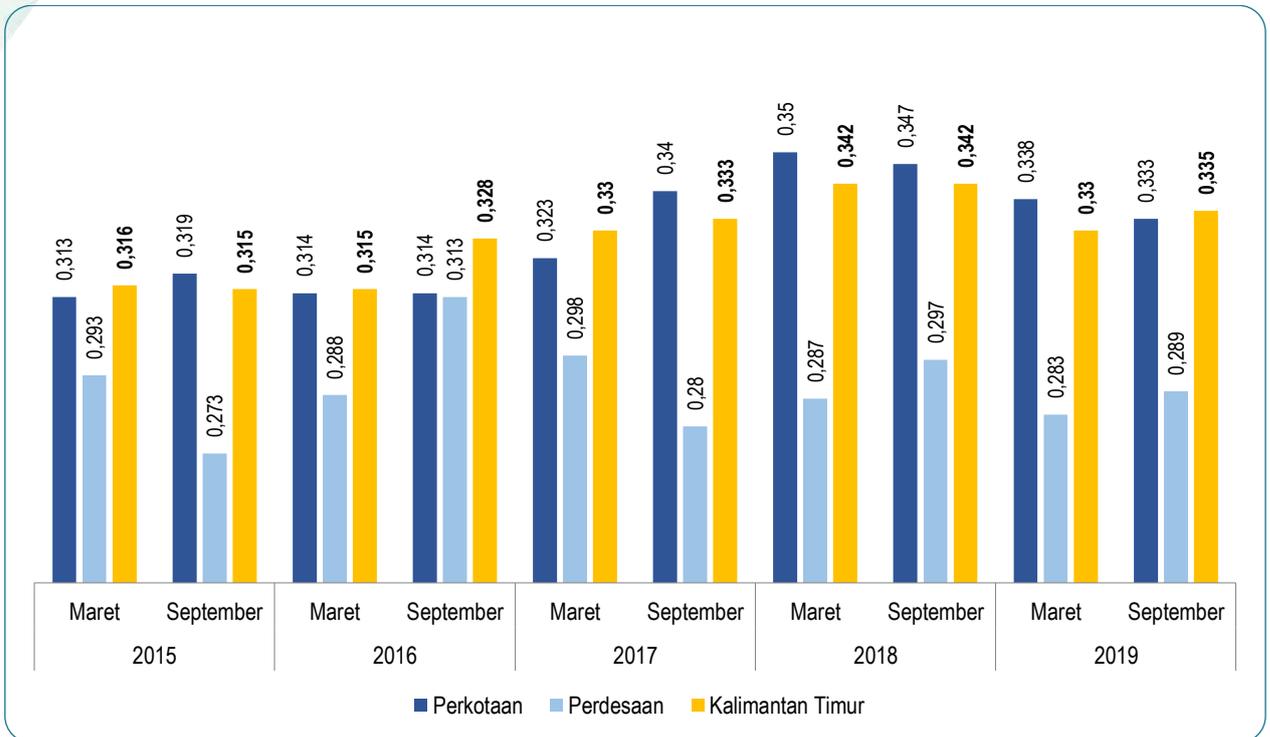
Gambar 3.1 Indeks Gini Indonesia Menurut Tipe Wilayah, Tahun 2015-2019

Tingginya tingkat ketimpangan perkotaan dibanding perdesaan memang lazim terjadi di negara sedang berkembang. Pada tahap awal perkembangan suatu wilayah, pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi cenderung menimbulkan terjadinya ketimpangan. Hal ini sejalan dengan munculnya aglomerasi aktivitas ekonomi pada suatu wilayah yang berdampak pada peningkatan standar hidup layak di suatu wilayah. Pada kondisi tersebut, masyarakat yang telah memiliki standar hidup yang baik, misalnya dalam hal pendidikan atau keterampilan, akan dapat memperoleh peluang dari dinamika perkembangan wilayah tersebut. Disisi lain, terdapat sebagian masyarakat yang mungkin tidak dapat merespons secara cepat perubahan di wilayah tersebut karena keterbatasan terhadap akses pendidikan/keterampilan dan tidak memiliki kompetensi untuk dapat meraih peluang tersebut, yang berakibat kepada timbulnya ketimpangan di wilayah tersebut.

Ketimpangan Pendapatan di Kalimantan Timur

Secara nasional, terdapat perbaikan distribusi pendapatan masyarakat. Namun demikian, perbaikan tersebut tidak dialami masyarakat di wilayah Kalimantan Timur. Walaupun sejak tahun 2015 tingkat ketimpangan pendapatan di Kalimantan Timur terus meningkat, bahkan kenaikannya mencapai 0,026 poin dari 0,316 pada tahun 2015 menjadi 0,342 pada tahun 2018, namun pada Maret 2019 mulai menurun menjadi 0,330. Perbaikan ketimpangan di Kalimantan Timur ini ternyata tidak bertahan lama, karena pada periode September 2019 indeks gininya naik tipis menjadi 0,335. Artinya, kesenjangan pengeluaran di Provinsi Kalimantan Timur semakin lebar dalam lima tahun terakhir. Bahkan pada Maret 2018, 40 persen penduduk terbawah hanya mengkonsumsi 20,24 persen dari total pengeluaran penduduk Kalimantan Timur.

Indeks gini yang tinggi menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan. Namun demikian, hal tersebut juga tidak selalu diartikan buruk. Dengan adanya ketimpangan, terdapat insentif bagi pekerja untuk bekerja keras dalam rangka meningkatkan produktivitas serta melakukan inovasi dalam menciptakan produk yang digunakan oleh masyarakat. Sebaliknya, bagi pekerja yang kurang bekerja keras, maka peluang untuk dapat memperoleh insentif akan semakin sulit diperoleh.



Sumber: BPS Kalimantan Timur

Gambar 3.2 Indeks Gini Kalimantan Timur, Tahun 2016-2019

Kondisi ketimpangan secara tidak langsung menunjukkan bahwa tidak semua orang memiliki peluang yang sama dalam mengakses layanan masyarakat terutama pelayanan kesehatan dan pendidikan yang merupakan modal dasar untuk mendapatkan penghasilan dan penghidupan yang layak. Akibat yang ditimbulkan dengan adanya ketimpangan akan membuat kondisi masyarakat menjadi rentan terhadap konflik yang disebabkan adanya kecemburuan sosial. Konflik di masyarakat akan mengganggu distribusi barang dan jasa sehingga menurunkan jumlah produksi dan mengurangi tingkat investasi, sehingga pada akhirnya akan menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu daerah secara umum.

Untuk memahami apa yang mendorong ketimpangan di Kalimantan Timur meningkat, perlu dipahami sumber daya apa saja yang dimiliki oleh rumah tangga dan bagaimana mereka menggunakan sumber daya tersebut untuk menghasilkan pendapatan. Menurut World Bank (2016) ada empat pendorong utama ketimpangan yang mempengaruhi generasi sekarang maupun masa depan.

Pertama, ketimpangan peluang, yang terjadi akibat faktor di luar kendali individu pada saat lahir. Sepertiga ketimpangan konsumsi di Indonesia disebabkan oleh sejumlah kecil faktor di luar kendali individu, terutama faktor pendidikan orang tua dan tempat di mana mereka lahir. Hal ini kemudian berdampak kepada munculnya kesenjangan dalam akses kesehatan, sanitasi dan akses pendidikan.

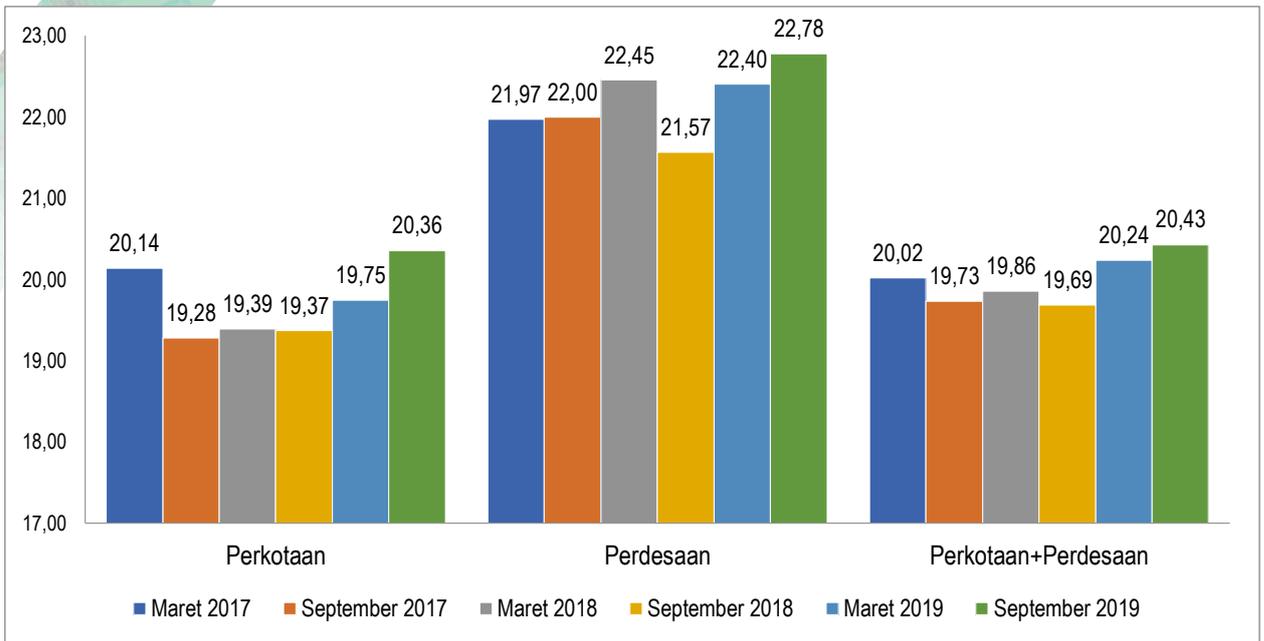
Kedua, dengan semakin besarnya tuntutan untuk memiliki keterampilan yang tepat dalam ekonomi modern, imbalan bagi mereka yang berhasil mendapatkan pekerjaan bagus semakin tinggi. Sementara mereka yang tidak punya keterampilan yang dibutuhkan, terjebak dalam pekerjaan informal atau pekerjaan dengan produktivitas dan upah rendah. Jika kedua faktor ini digabungkan maka ketimpangan upah meningkat.

Ketiga, semakin terpusatnya sumber daya keuangan di tangan segelintir rumah tangga kaya menimbulkan ketimpangan pendapatan yang lebih tinggi saat ini dan memperkuat ketimpangan sumber daya manusia dan keuangan pada generasi berikutnya. Keempat, guncangan (*shock*), dapat mempengaruhi ketimpangan pada tahap mana pun dengan cara mengikis kemampuan rumah tangga untuk mendapatkan penghasilan, menabung, dan berinvestasi pada kesehatan dan pendidikan.

Selain ukuran Indeks Gini, *World Bank* mengeluarkan ukuran ketimpangan lain yang mengacu pada besarnya jumlah pengeluaran, sebagai *proxy* dari ukuran pendapatan rumahtangga, untuk penduduk yang berada pada kelompok 40 persen dengan pendapatan terendah. Jika besaran persentase pengeluaran penduduk pada tersebut lebih kecil dari 12 persen, maka dikatakan bahwa terdapat ketimpangan tinggi. Sementara itu, jika proporsi pengeluaran kelompok tersebut berkisar 12 hingga 17 persen, maka dikatakan bahwa di wilayah tersebut terdapat ketimpangan pendapatan pada kategori sedang atau menengah. Sedangkan jika proporsi pengeluaran yang dilakukan oleh kelompok penduduk tersebut mencakup lebih besar daripada 17 persen dari total pengeluaran penduduk di wilayah tersebut, maka wilayah tersebut disebut memiliki tingkat ketimpangan yang rendah.

Gambar 3.3 menunjukkan bahwa selama kurun waktu 2017 hingga 2019 terlihat bahwa proporsi pengeluaran dari kelompok penduduk dengan pendapatan 40 persen terendah lebih dari 19 persen. Bahkan pada periode September 2019 tercatat bahwa proporsi pengeluaran pada kelompok penduduk tersebut sebesar 20,43 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ketimpangan pendapatan yang ada di Kalimantan Timur termasuk kedalam kategori rendah. Lebih lanjut, terdapat peningkatan proporsi pengeluaran pada kelompok penduduk dengan pendapatan 40 persen terendah. Persentase pengeluaran pada kelompok penduduk tersebut pada bulan September 2019 ini lebih besar jika dibandingkan dengan kondisi sejak Maret 2017 hingga Maret 2019. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat perbaikan pemerataan pendapatan di Kalimantan Timur.

Namun demikian, jika dirinci menurut daerah tempat tinggal, terlihat perbedaan kondisi ketimpangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Besaran proporsi pengeluaran untuk penduduk dengan pendapatan 40 persen terendah di wilayah perkotaan lebih kecil dibandingkan dengan proporsi pengeluaran kelompok penduduk yang sama yang berada di wilayah pedesaan. Pada September 2019, proporsi pengeluaran penduduk dengan pendapatan 40 persen terendah di wilayah perkotaan hanya sebesar 20,36 persen, sedangkan di daerah pedesaan tercatat sebesar 22,78 persen. Hal ini menggambarkan bahwa secara umum kedua wilayah tersebut memiliki ketimpangan yang rendah, namun wilayah pedesaan memiliki keunggulan dalam hal pemerataan pendapatan dibandingkan wilayah perkotaan.



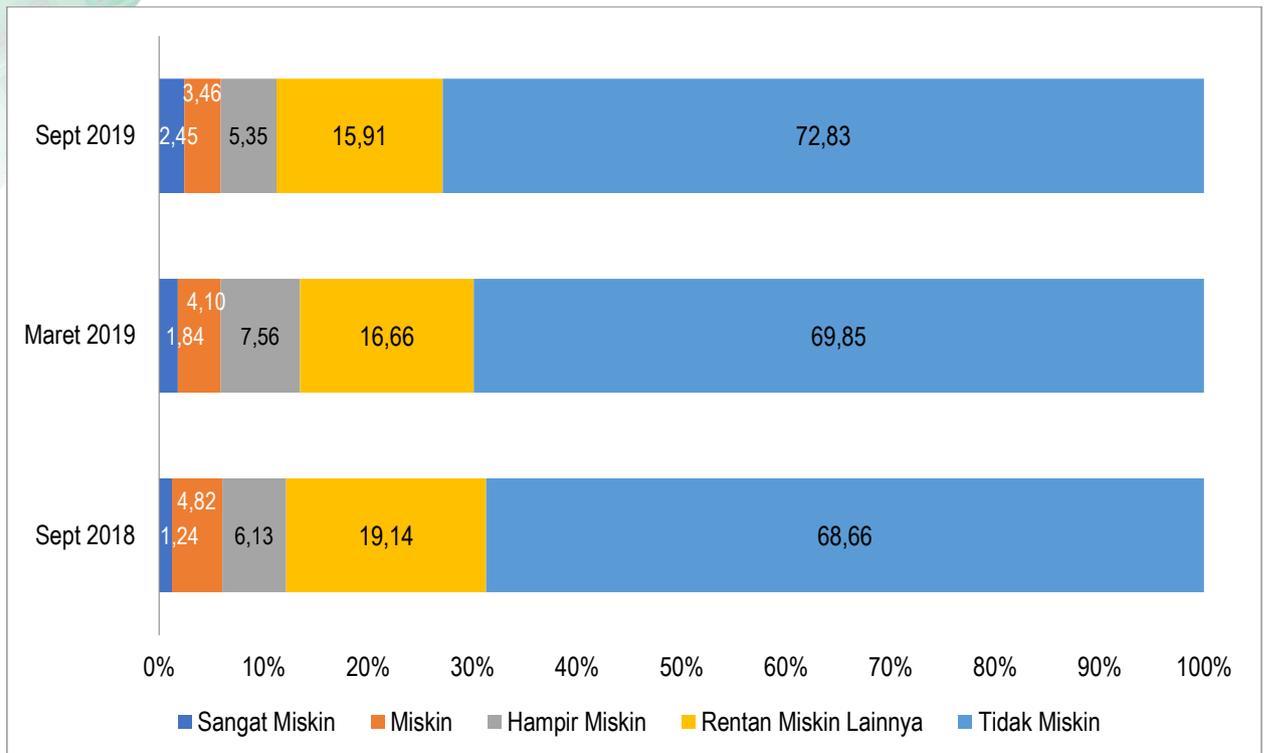
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Gambar 3.3 Perkembangan Persentase Pengeluaran Kelompok 40 Persen Terendah, Maret 2017-September 2019

Gambaran mengenai perkembangan kelompok penduduk dengan pendapatan 40 persen terendah, secara tidak langsung juga memberikan informasi terkait dengan gambaran kondisi pada penduduk miskin di suatu wilayah. Penduduk miskin di suatu wilayah merupakan bagian dari kelompok penduduk yang memiliki pendapatan terendah. Tercatat pada September 2019, persentase penduduk miskin Kalimantan Timur sebesar 5,91 persen. Jika dibandingkan periode September 2018, yang tercatat sebesar 6,06 persen, angka tersebut menunjukkan adanya penurunan angka kemiskinan. Namun jika dilakukan pemilahan untuk kelompok penduduk sangat miskin, miskin, hampir miskin dan tidak miskin, maka terlihat bahwa penduduk sangat miskin pada September 2019 kembali mengalami peningkatan jika dibandingkan Maret 2019. Pada September 2018, proporsi penduduk sangat miskin adalah sebesar 1,24 persen, mengalami peningkatan pada Maret 2019, yaitu menjadi sebesar 1,84 persen dan kembali meningkat menjadi 2,45 persen pada September 2019.

Selain itu, perkembangan kondisi kelompok penduduk yang termasuk kedalam rentan miskin juga perlu diperhatikan. Penduduk rentan miskin adalah penduduk yang besaran nilai pendapatannya telah berada diatas batas garis kemiskinan, namun belum sepenuhnya aman, karena kondisinya sangat dipengaruhi oleh adanya *shock* dalam perekonomian. Penduduk pada kategori ini akan mudah jatuh kedalam jurang kemiskinan jika perekonomian diguncang *shock*, walaupun kecil. Pada September 2019, masih terdapat 21,26 persen penduduk yang termasuk dalam kategori ini. Jika dibandingkan *year on year* dengan angka pada September 2018, yakni sebesar 25,27 persen, maka terdapat penurunan proporsi penduduk rentan miskin. Namun demikian, jika kelompok penduduk tersebut dirinci, maka terlihat bahwa terdapat peningkatan proporsi kelompok penduduk hampir miskin dari sebesar 6,13 persen pada September 2018 menjadi sebesar 7,56 persen pada Maret 2019. Hal tersebut menunjukkan bahwa di Kalimantan Timur terjadi peningkatan proporsi penduduk yang rawan terhadap *shock* dalam ekonomi. Oleh karena itu diperlukan kebijakan yang dapat memberikan jaminan bahwa penduduk, terutama yang berada pada kelompok rentan miskin, tidak terpengaruh

atau tidak kembali menjadi penduduk miskin ketika guncangan dalam ekonomi terjadi di Kalimantan Timur.



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Gambar 3.4 Perkembangan Penduduk Miskin menurut Kriteria, September 2018-September 2019

3.2 Kondisi Ketimpangan Antar Wilayah (Indeks Williamson)

Ketimpangan wilayah terjadi akibat pertumbuhan ekonomi tidak diikuti pemerataan ekonomi sehingga kegiatan ekonomi terkonsentrasi pada suatu wilayah. Terlihat dengan adanya wilayah yang maju dan terbelakang atau kurang maju. Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Menurut Sjafrizal (2012), beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya ketimpangan antar wilayah, yaitu perbedaan kandungan sumber daya alam, perbedaan kondisi geografis, kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa, konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, serta alokasi dana pembangunan antar wilayah.

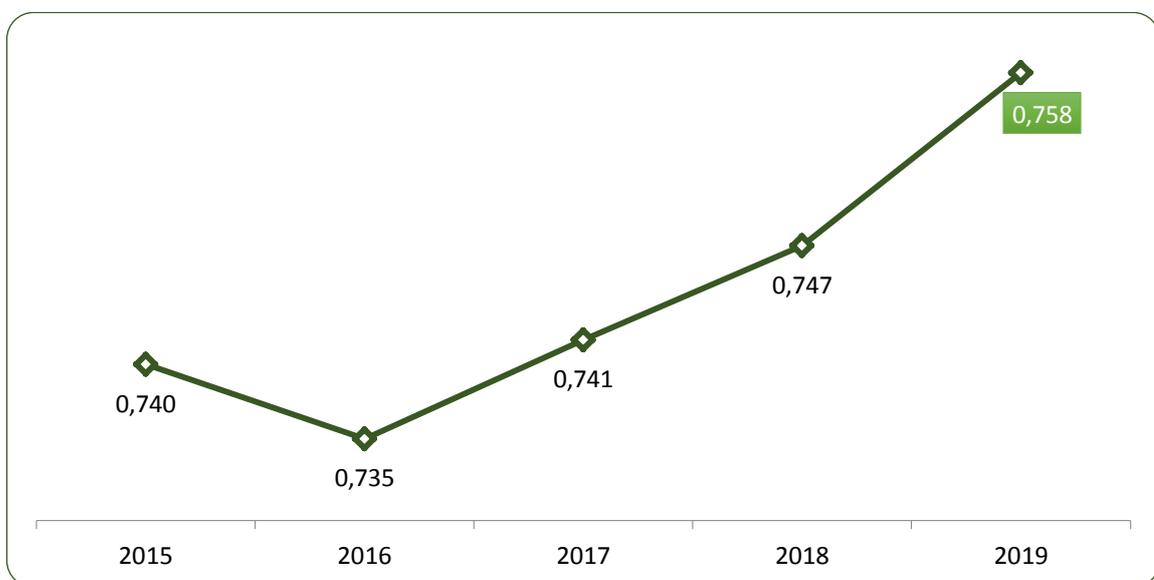
Ketimpangan pembangunan telah memberikan berbagai dampak terhadap daerah dan masyarakat. Berapa indikator yang menunjukkan ketimpangan antar wilayah adalah terdapat wilayah yang proses pembangunan infrastrukturnya, seperti infrastruktur pendidikan dan kesehatan, yang masih relatif tertinggal dibandingkan wilayah lain. Kondisi tersebut mengakibatkan wilayah yang ketersediaan infrastrukturnya kurang akan sulit untuk diakses sehingga berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan wilayah tersebut menjadi terhambat (Bappenas, 2016). Bentuk kesenjangan wilayah lain yang sering dijumpai adalah terdapat kesenjangan antara wilayah kota dan desa. Pada wilayah perkotaan, dimana infrastrukturnya sudah lebih baik, maka terdapat konsentrasi aktivitas ekonomi, sehingga terdapat kecenderungan tingginya jumlah penduduk karena infrastruktur pemukiman, seperti fasilitas pendidikan dan kesehatan, relatif lebih banyak tersedia dibandingkan di wilayah pedesaan.

Dampak utama dari ketimpangan pembangunan adalah timbulnya masalah sosial di masyarakat, seperti pengangguran, kemiskinan dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Dampak tersebut merupakan muncul akibatnya kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan di wilayah yang kinerja pembangunan tidak cukup baik. Tingginya angka pengangguran di suatu wilayah cenderung akan diikuti oleh terjadinya kemiskinan. Pada akhirnya, kemiskinan yang terjadi di masyarakat pada suatu wilayah akan mengakibatkan rendahnya kualitas sumber daya manusia generasi berikutnya, karena kesulitan untuk dapat mengakses fasilitas pendidikan akibat rendahnya pendapatan masyarakat.

Selain Indeks Gini, untuk mengukur kondisi ketimpangan wilayah digunakan indikator Indeks Williamson. Indeks tersebut merupakan satu instrumen dalam pengukuran pembangunan wilayah dengan membandingkannya dengan cakupan wilayah yang lebih besar. Berbeda dengan Indeks Gini, yang mengukur ketimpangan vertikal, yaitu ketimpangan antara kelompok berpendapatan tertinggi dan terendah, Indeks Williamson merupakan ukuran ketimpangan horizontal. Adapun indikator dasar yang digunakan untuk penghitungan Indeks Williamson adalah PDRB dan data penduduk. Indeks Williamson yang digunakan pada analisis ketimpangan ini menggunakan pendapatan per kapita suatu wilayah dan jumlah penduduk di wilayah tersebut. Interpretasi dari hasil Indeks Williamson adalah apabila indeks mendekati 1 (satu) berarti terjadi ketimpangan yang tinggi, sebaliknya jika mendekati 0 (nol) berarti pendapatan masyarakat antar wilayah relatif merata.

Kondisi Ketimpangan Antar Wilayah di Indonesia

Pada tahun 2019, Indeks Williamson Indonesia tercatat sebesar 0,758, meningkat jika dibandingkan tahun 2017, yakni sebesar 0,747. Besaran Indeks tersebut menunjukkan bahwa di wilayah Indonesia, terdapat ketimpangan antar wilayah yang cukup tinggi. Lebih lanjut, selama periode 2015 hingga 2019, nilai Indeks Williamson untuk Indonesia menunjukkan angka di atas 0,70 bahkan mengalami kecenderungan meningkat. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa selama periode tersebut disparitas antar provinsi di Indonesia masih belum mengalami perubahan yang signifikan dan masih berada pada posisi ketimpangan yang cukup tinggi.



Sumber: BPS

Gambar 3.6 Ketimpangan Antar Wilayah di Indonesia (Indeks Williamson)

Salah satu faktor penyebab tingginya disparitas antar provinsi atau wilayah di Indonesia adalah akibat terjadinya konsentrasi kegiatan perekonomian maupun pembangunan, yang masih terpusat di beberapa wilayah saja di Indonesia, terutama Pulau Jawa. Hal ini dapat dilihat dari ukuran nilai PDRB yang dihasilkan oleh aktivitas ekonomi di masing-masing wilayah. Jika dijumlahkan, nilai PDRB dari Pulau Jawa mencapai sekitar 59 persen dari total nilai perekonomian Indonesia. Angka tersebut juga memberikan gambaran mengenai ketersediaan infrastruktur ekonomi di Pulau Jawa yang lebih baik dibandingkan wilayah lainnya, sehingga biaya untuk melakukan kegiatan ekonomi relatif lebih murah dibandingkan wilayah lainnya di Indonesia.

Tabel 3.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita (Ribu Rupiah)

PROVINSI (1)	2015 (2)	2016 (3)	2017 (4)	2018* (5)	2019** (6)
Aceh	25 808,45	26 851,88	28 096,71	29 521,50	30 570,54
Sumatera Utara	41 019,54	44 392,46	47 978,43	51 416,76	55 054,46
Sumatera Barat	34 630,86	37 284,56	40 193,61	42 832,69	45 288,33
Riau	102 887,81	104 861,11	105 858,67	110 826,76	109 757,07
Jambi	45 580,04	49 494,98	54 016,28	58 364,90	60 065,40
Sumatera Selatan	41 201,28	43 361,26	46 315,05	50 144,21	53 742,16
Bengkulu	26 845,61	29 076,22	31 359,48	33 827,18	36 220,19
Lampung	31 153,72	34 053,97	36 998,24	39 864,05	42 693,52
Kep. Bangka Belitung	44 425,08	46 402,47	48 824,52	50 051,83	50 933,45
Kep. Riau	101 148,53	106 503,78	109 359,65	116 580,60	122 430,35
DKI Jakarta	195 431,68	210 075,09	228 003,64	248 305,87	268 564,84
Jawa Barat	32 648,02	34 893,62	37 228,59	40 305,59	43 092,05
Jawa Tengah	29 933,75	31 961,95	34 222,81	36 783,71	39 243,31
DI Yogyakarta	27 571,53	29 552,53	31 665,53	34 152,47	36 794,87
Jawa Timur	43 541,40	47 491,52	51 228,45	55 436,37	59 257,09
Banten	40 091,23	42 439,73	45 264,77	48 457,01	51 438,63
Bali	42 480,08	46 211,04	50 288,04	54 618,43	58 243,79
Nusa Tenggara Barat	21 851,53	23 786,95	24 994,40	24 706,70	26 166,48
Nusa Tenggara Timur	14 867,16	16 093,51	17 165,20	18 446,78	19 591,07
Kalimantan Barat	30 619,33	33 190,65	35 984,02	38 793,66	41 884,61
Kalimantan Tengah	40 105,06	43 905,33	48 295,98	52 154,07	55 355,80
Kalimantan Selatan	34 351,69	36 022,98	38 638,15	41 106,45	42 585,74
Kalimantan Timur	147 405,43	145 343,19	165 651,91	174 882,37	175 654,06
Kalimantan Utara	96 150,38	99 112,33	111 319,55	120 125,69	131 302,21
Sulawesi Utara	37 786,58	41 246,25	44 745,77	48 117,85	51 935,52
Sulawesi Tengah	37 394,89	41 082,04	45 157,28	50 037,92	54 486,44
Sulawesi Selatan	39 950,48	43 817,39	47 840,14	52 706,74	57 025,55
Sulawesi Tenggara	35 092,25	38 022,13	41 278,84	44 501,90	47 790,28
Gorontalo	25 143,39	27 544,77	29 565,39	31 831,74	34 217,14
Sulawesi Barat	25 728,07	27 513,06	29 740,93	32 123,75	33 588,16
Maluku	20 365,60	21 599,17	22 859,33	24 278,49	25 657,52
Maluku Utara	22 917,73	24 580,75	26 686,06	29 609,52	31 626,76

PROVINSI (1)	2015 (2)	2016 (3)	2017 (4)	2018* (5)	2019** (6)
Papua Barat	72 159,85	74 584,63	78 428,68	84 957,90	87 897,24
Papua	47 726,07	54 002,15	57 866,30	63 403,51	56 140,71

Sumber: BPS

Keterangan :

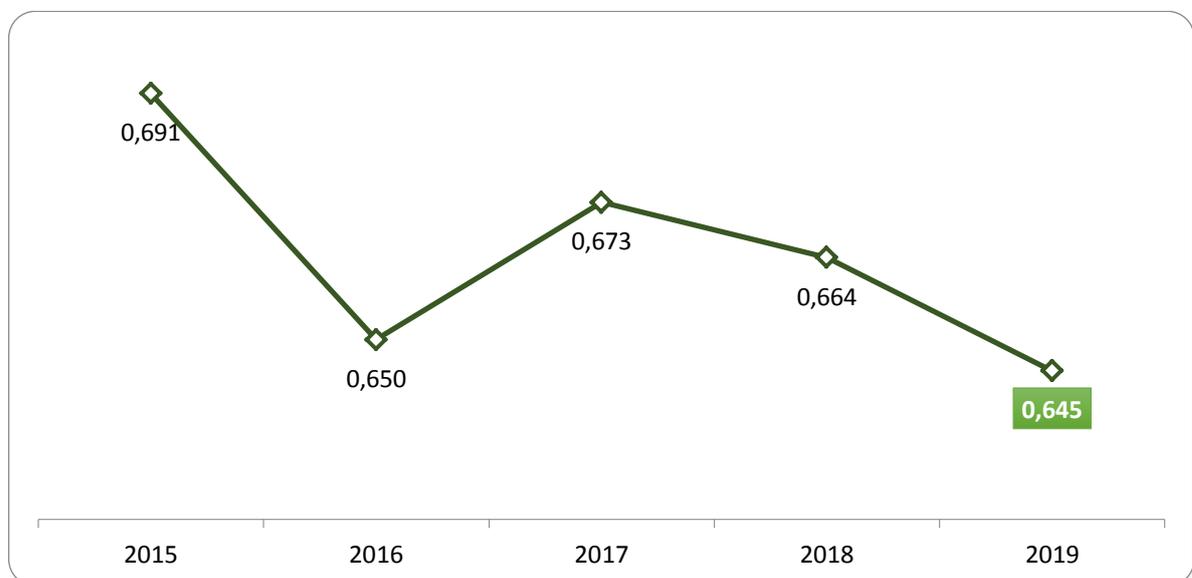
* : Angka sementara

** : Angka sangat sementara

Jika dilihat dari angka PDRB per kapita pada masing-masing provinsi di Indonesia, terlihat bahwa selama tahun 2019 terdapat beberapa provinsi yang memiliki PDRB per kapita yang sangat tinggi (lebih dari Rp100 juta per tahun) dan sebaliknya terdapat beberapa provinsi yang PDRB per kapitanya cukup rendah (kurang dari Rp50 juta per tahun). Adapun beberapa provinsi yang memiliki PDRB per kapita sangat tinggi adalah DKI Jakarta, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Jika dicermati, kecuali DKI Jakarta, provinsi-provinsi dengan nilai PDRB per kapita yang tinggi tersebut merupakan wilayah yang karakteristik ekonominya berbasis sumber daya alam yang tidak terbarukan. Pada jangka pendek dimana ketersediaan sumber daya relatif masih berlimpah, maka eksploitasi dari SDA tersebut dapat memberikan manfaat ekonomi. Namun, untuk jangka panjang seiring dengan berkurangnya cadangan SDA tidak terbarukan, maka besaran nilai PDRB per kapita pada provinsi-provinsi tersebut akan cenderung menurun, akibatnya pertumbuhan ekonomi wilayah tidak dapat berkelanjutan.

Kondisi Ketimpangan Antar Wilayah Regional Kalimantan

Berdasarkan penghitungan Indeks Williamson, kesenjangan antar wilayah dalam regional Kalimantan juga tercatat masih cukup tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh besaran angka Indeks Williamson yang selalu berada di atas angka 0,60, walaupun terdapat kecenderungan semakin menurun. Pada tahun 2019, indeks Williamson antar provinsi di Pulau Kalimantan sebesar 0,645. Jika dibandingkan angka Indeks Williamson tahun 2017 yang sebesar 0,664, maka angka tersebut mengalami sedikit penurunan.



Sumber: BPS

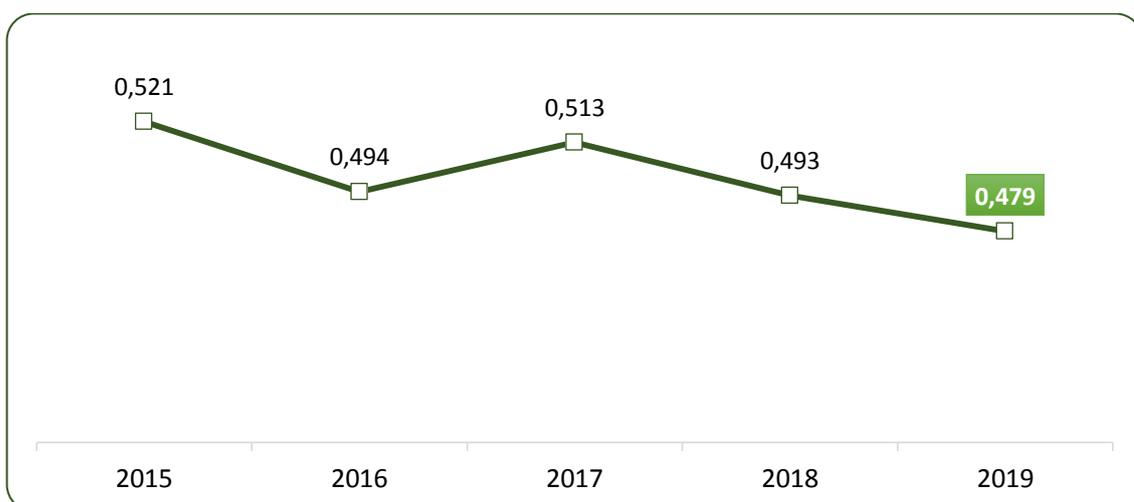
Gambar 3.7 Ketimpangan Antar Wilayah Regional Kalimantan (Indeks Williamson)

Secara umum, struktur perekonomian di pulau Kalimantan masih mengandalkan kekayaan sumber daya alam atau sektor primer. Sektor Pertanian menjadi *leading sector* bagi perekonomian di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, sedangkan sektor Pertambangan dan Penggalian menjadi *leading sector* bagi perekonomian di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara. Ketimpangan yang cukup tinggi pada regional Kalimantan ini disebabkan perbedaan potensi dan produktivitas hasil sumber daya alam pada masing-masing provinsi.

Pada tahun 2019, Kalimantan Timur memegang 50,50 persen perekonomian di pulau Kalimantan, disusul Kalimantan Barat yang menyumbang 16,40 persen perekonomian, sedangkan Kalimantan Utara hanya menyumbang 7,53 persen. Sedangkan jika dilihat dari PDRB per kapita, Kalimantan Timur memiliki PDRB per kapita yang tertinggi yakni mencapai 175,65 juta rupiah, sedangkan PDRB per kapita di Kalimantan Barat hanya seperempat dari PDRB per kapita Kalimantan Timur, yakni hanya sebesar 41,88 juta rupiah.

Kondisi Ketimpangan di Kalimantan Timur

Dalam konteks wilayah Kalimantan Timur, kondisi ketimpangan di wilayah ini relatif moderat, bahkan termasuk rendah. Hal ini ditunjukkan oleh besaran nilai Indeks Williamson di dalam wilayah Kalimantan Timur yang berada pada kisaran 0,40 - 0,50. Nilai tersebut menunjukkan bahwa antar kabupaten/kota di Kalimantan Timur memiliki kondisi ekonomi yang relatif homogen. Namun, disisi lain besaran yang relatif sama tersebut dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir mengindikasikan bahwa masih diperlukan berbagai kebijakan yang lebih tepat yang dapat lebih menurunkan ketimpangan antara kabupaten/kota yang terjadi.



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Gambar 3.8 Ketimpangan Antar Wilayah Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur (Indeks Williamson)

Kondisi perekonomian kabupaten/kota yang hampir homogen tersebut disebabkan karena wilayah kabupaten/kota di Kalimantan Timur memiliki struktur ekonomi yang hampir sama. Sebagian besar perekonomian di kabupaten/kota di Kalimantan Timur mengandalkan sumber daya alam atau memiliki karakteristik ekonomi yang berbasis sektor primer. Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi penyumbang perekonomian terbesar di Kalimantan Timur, disusul oleh Kabupaten Kutai Timur dan Kota Balikpapan. Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Timur sangat mengandalkan perekonomiannya pada sektor Pertambangan dan Penggalian, sedangkan Kota Balikpapan mengandalkan industri pengolahan, khususnya industri pengilangan migas sebagai sumber perekonomian.

Berdasarkan PDRB per kapita di Kalimantan Timur, dapat terlihat bahwa Kota Bontang memiliki PDRB per kapita terbesar di tahun 2019 yakni mencapai 332,05 juta rupiah, sedangkan Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki PDRB per kapita terendah, yakni sebesar 56,47 juta rupiah.

**Tabel 3.2 Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita (Ribu Rupiah)
Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur**

PROVINSI (1)	2015 (2)	2016 (3)	2017 (4)	2018* (5)	2019** (6)
Paser	146 050,83	139 005,28	160 214,42	172 388,83	168 508 ,96
Kutai Barat	146 040,74	150 513,19	174 509,87	190 169,61	195 009, 08
Kutai Kartanegara	177 143,27	173 968,11	196 822,28	208 746,03	207 015 ,42
Kutai Timur	292 204,68	285 338,32	340 467,62	347 035,11	355 546 ,83
Berau	143 987,03	143 437,25	165 489,46	172 077,83	168 113 ,83
PPU	48 317,88	49 241,18	53 774,37	55 531,29	56 474 ,76
Mahakam Ulu	76 265,79	82 108,10	88 849,76	95 286,39	103 061 ,64
Balikpapan	120 775,79	128 124,63	136 772,52	147 371,97	156 276 ,67
Samarinda	62 515,11	63 560,52	69 313,15	74 523,98	78 566 ,95
Bontang	358 796,85	331 035,96	344 626,33	337 950,96	329 049 ,66

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Keterangan :

* : Angka sementara

** : Angka sangat sementara

BAB IV

KETIMPANGAN DALAM TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan target pembangunan universal yang disepakati oleh negara-negara di dunia yang sangat ambisius karena TPB bertekad untuk menuntaskan seluruh target dari Tujuan global pada tahun 2030 atau dikenal dengan istilah “*zero goals*”. Misalnya tujuan 1 yaitu tanpa kemiskinan yang berarti pada tahun 2030 jumlah penduduk miskin menjadi 0 persen atau tidak ada lagi penduduk miskin dalam segala bentuk.

Tujuan kesepuluh dalam TPB berkaitan dengan masalah ketimpangan, yakni mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara. Kesenjangan yang terjadi baik di dalam negara maupun antarnegara akan mengancam pembangunan sosial maupun ekonomi dalam jangka panjang dan akan mengganggu usaha penurunan kemiskinan. Dalam tujuan kesepuluh ini terdapat 7 target dan beberapa indikator di dalamnya. Beberapa indikator dalam tujuan ini telah dijabarkan pada bab sebelumnya, seperti indikator 10.1.1* Koefisien Gini dan indikator 10.1.1 (a) Persentase penduduk hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Masih terdapat cukup banyak indikator yang akan dikembangkan untuk dapat melihat capaian tujuan kesepuluh TPB ini. Pada bab ini akan dijelaskan beberapa indikator yang sudah tersedia datanya.

Indikator 10.1.1 (a) Jumlah Daerah Tertinggal yang Terentaskan

Kesenjangan pembangunan antar wilayah masih terjadi di Indonesia sehingga memunculkan daerah tertinggal. Kesenjangan terutama terjadi di antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) disebabkan strategi pembangunan yang belum tepat. Presiden telah menetapkan 122 daerah tertinggal yang menjadi lokus prioritas pada tahun 2015-2019. Penetapan tersebut berdasarkan Perpres No 131 Tahun 2015. Dalam Perpres disebutkan bahwa daerah tertinggal merupakan daerah yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional. Daerah yang ditetapkan sebagai daerah tertinggal di Kawasan Barat Indonesia sebanyak 19 kabupaten sedangkan di Kawasan Timur Indonesia sebanyak 103 kabupaten.

Di Provinsi Kalimantan Timur terdapat 1 kabupaten yang ditetapkan sebagai daerah tertinggal berdasarkan Perpres tersebut, yakni kabupaten Mahakam Ulu.

Indikator 10.1.1 (b) Jumlah Desa Tertinggal

Jumlah desa tertinggal ditentukan berdasarkan Indeks Pembangunan Desa. Indeks Pembangunan Desa (IPD) disusun untuk menunjukkan tingkat perkembangan di suatu desa. Dari hasil skor IPD ditentukan pengelompokan desa menjadi 3 kategori, yaitu desa mandiri, desa berkembang, dan desa tertinggal.

Desa tertinggal yaitu desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar, infrastruktur, aksesibilitas/transportasi, pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan yang masih minim. Pada tahun 2014, di Kalimantan Timur terdapat 23,17 persen berstatus desa tertinggal

atau sebanyak 193 desa. Jumlah desa tertinggal mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 14,27 persen yang berstatus desa tertinggal atau sebanyak 120 desa. Selama waktu tersebut, terdapat sejumlah desa tertinggal yang telah berhasil dituntaskan.

Kabupaten Mahakam Ulu memiliki desa tertinggal dengan persentase tertinggi sebesar 46,00 persen dari 50 desa. Sedangkan Kabupaten Penajam Paser Utara tidak memiliki desa tertinggal.

Indikator 10.1.1 (c) Jumlah Desa Mandiri

Desa Mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah baik.

Pada tahun 2014, di Kalimantan Timur terdapat 2,52 persen dikategorikan sebagai desa mandiri atau sebanyak 21 desa. Desa mandiri meningkat menjadi 4,52 persen yang berstatus desa mandiri atau sebanyak 38 desa pada tahun 2018.

Pada tahun 2014, Kabupaten Mahakam Ulu dan Kabupaten Berau belum memiliki desa mandiri. Namun pada tahun 2018, kedua kabupaten ini telah memiliki desa mandiri.

Indikator 10.1.1 (d) Pertumbuhan Ekonomi di Daerah Tertinggal

Seperti disebutkan sebelumnya bahwa di Kalimantan Timur terdapat 1 kabupaten yang ditetapkan sebagai daerah tertinggal yakni Kabupaten Mahakam Ulu. Selama periode 2015 hingga 2019, pertumbuhan ekonomi di wilayah ini cenderung mengalami kenaikan dan selalu berada di atas pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur. Pengembangan daerah tertinggal sangat penting dalam upaya pengentasan kemiskinan karena penduduk miskin kebanyakan berada di daerah tertinggal.

Indikator 10.1.1 (e) Persentase Penduduk Miskin di Daerah Tertinggal

Penduduk miskin kebanyakan berada di daerah tertinggal ditandai dengan dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Mahakam Ulu merupakan yang tertinggi di Kalimantan Timur yakni sebesar 11,25 persen.

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Isu ketimpangan merupakan tantangan yang perlu dihadapi dalam proses pembangunan di Indonesia. Hal ini terlihat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dimana salah satu target yang ingin dicapai adalah pengurangan ketimpangan, dari Indeks Gini sebesar 0,41 menjadi sebesar 0,36 di tahun 2019. Capaian pemerataan pendapatan di Indonesia hingga tahun 2018 adalah sebesar 0,380 yang menempatkan Indonesia pada kelompok negara dengan ketimpangan sedang. Jika diamati perkembangan antar waktu, terdapat tren menurun pada ketimpangan pendapatan di Indonesia. Namun demikian, penurunan yang terjadi tidak signifikan dimana posisi Indonesia masih dalam kelompok ketimpangan sedang.

Dalam konteks kewilayahan di Kalimantan Timur, besaran Indeks Gini berada dibawah rata-rata Nasional, namun masih termasuk dalam kategori ketimpangan pendapatan sedang. Jika dirinci menurut kabupaten/kota, hampir seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Timur memiliki kondisi ketimpangan sedang, kecuali Kabupaten Paser yang ketimpangan pendapatan masyarakatnya termasuk rendah. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa antar waktu, terdapat kecenderungan peningkatan ketimpangan pendapatan di Kalimantan Timur. Bahkan terdapat peningkatan yang lebih tajam pada kurun setahun terakhir.

Masalah ketimpangan pendapatan perlu menjadi perhatian dan harus diatasi dalam pembangunan suatu wilayah, karena peningkatan ketimpangan pendapatan di suatu wilayah berpotensi untuk mengurangi pertumbuhan ekonomi (Yumna dkk. 2015). Dalam penelitiannya, Yumna dkk. menyatakan bahwa terdapat hubungan nonlinear yang berbentuk *inverted U-shape* antara ketimpangan pendapatan dengan pertumbuhan ekonomi wilayah. Hingga pada level tertentu, peningkatan ketimpangan pendapatan akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, peningkatan besaran ketimpangan pendapatan di suatu wilayah berpotensi mengurangi pertumbuhan ekonomi.

Studi empiris yang dilakukan oleh Suryadarma dkk. (2005) menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan yang terjadi di masyarakat mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak mampu dalam mengurangi kemiskinan di suatu wilayah. Ketimpangan pendapatan mempengaruhi nilai elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap pengurangan kemiskinan. Semakin tinggi ketimpangan pendapatan, maka terjadi penurunan elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap pengurangan kemiskinan. Berdasarkan data tahun 1999, dimana kondisi ketimpangan pendapatan masyarakat di Indonesia berada pada titik terendah dalam kurun waktu 15 tahun, dan tingkat pengurangan kemiskinan selama periode 1999 hingga 2002 cukup baik.

Lebih lanjut, Pierskall dan Sacks dalam Suryahadi dkk. (2018) menyebutkan bahwa ketimpangan pendapatan berpotensi menciptakan konflik sosial antar masyarakat. Kondisi yang tidak kondusif tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan memberikan dampak negatif terhadap aktivitas ekonomi di suatu wilayah. Hal ini berdampak kepada semakin terhambatnya proses pembangunan ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah tidak dapat tercipta.

Beberapa faktor penyebab terjadinya ketimpangan pendapatan di Indonesia adalah kondisi pendidikan, tingkat kesejahteraan dan sektor ketenagakerjaan (Wicaksono dkk. 2017). Tidak

meratanya akses masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan memberikan dampak terhadap kondisi ketimpangan kompetensi SDM. Untuk kelompok masyarakat yang lebih mampu, mereka dapat lebih mudah mengakses layanan pendidikan, sehingga SDM pada kelompok masyarakat tersebut memiliki kompetensi yang lebih baik dibandingkan SDM pada kelompok lainnya, sehingga kemampuan mereka lebih baik ketika masuk ke pasar tenaga kerja. Akibatnya pada jangka panjang hal tersebut memberikan dampak negatif terhadap ketimpangan, dimana kelompok masyarakat yang memiliki akses yang lebih baik untuk memperoleh layanan pendidikan, juga berpeluang untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang lebih baik.

Tingkat kesejahteraan juga sangat berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Kesejahteraan yang lebih baik akan dapat lebih menjamin masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, jaminan pendidikan dan kesehatan yang layak dapat membentuk kualitas SDM yang lebih baik. Sama halnya dengan faktor pendidikan, *gap* yang cukup tinggi pada tingkat kesejahteraan antar kelompok masyarakat juga berpotensi menimbulkan ketimpangan pendapatan pada generasi di masa depan.

Faktor ketenagakerjaan juga berpeluang terhadap timbulnya masalah ketimpangan di Indonesia. Studi yang dilakukan oleh Wicaksono dkk. menunjukkan perbedaan pendapatan antar tenaga kerja juga disebabkan oleh adanya perbedaan faktor pendidikan antar tenaga kerja. Lebih lanjut, perbedaan juga terjadi antar wilayah pedesaan dan perkotaan, dimana karakteristik ketenagakerjaan antar kedua wilayah tersebut berbeda. Wilayah pedesaan cenderung didominasi oleh sektor pertanian, sedangkan wilayah perkotaan didominasi oleh sektor non pertanian, yang kebutuhan skill tenaga kerja relatif lebih tinggi dibandingkan sektor pertanian.

Indikator Indeks Gini menunjukkan kondisi ketimpangan pendapatan masyarakat, atau dikenal dengan ketimpangan vertikal. Dengan melihat aspek kewilayahan, maka ketimpangan juga dapat diukur salah satunya adalah dengan indikator Indeks Williamson. Indeks Williamson menunjukkan ketimpangan pendapatan antar wilayah, dalam konteks Provinsi Kalimantan Timur adalah antar kabupaten/kota.

Pada tingkat Nasional, Indeks Williamson menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan yang cukup tinggi antar provinsi di Indonesia. Pada tahun 2019, Indeks Williamson Indonesia adalah sebesar 0,758. Angka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan tahun 2018, yang sebesar 0,747, menunjukkan bahwa terdapat peningkatan ketimpangan antar provinsi di Indonesia. Sementara itu, nilai Indeks Williamson Kalimantan Timur lebih rendah dibandingkan rata-rata Nasional, yaitu berada di kisaran 0,40 hingga 0,50, yang menunjukkan ketimpangan yang relatif moderat bahkan termasuk rendah. Namun demikian, selama kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir nilai tersebut tidak mengalami penurunan berarti, yang mengindikasikan bahwa belum terdapat perbaikan yang signifikan pada ketimpangan antar wilayah kabupaten/kota di Kalimantan Timur.

Studi empiris yang dilakukan oleh Demurger dkk. (2002) di China menunjukkan bahwa terdapat disparitas antar wilayah, yaitu antara wilayah pesisir dan non pesisir. Hal ini disebabkan karena adanya kebijakan yang lebih menguntungkan wilayah pesisir, dimana provinsi-provinsi yang berada pada wilayah tersebut memiliki peluang untuk berperan dalam ekonomi internasional. Sedangkan wilayah-wilayah non pesisir menghadapi kesulitan untuk dapat berperan serta karena kondisi infrastruktur yang menyebabkan akses menuju dan keluar wilayah non pesisir menjadi relatif lebih sulit.

Sementara itu, studi yang dilakukan oleh Cameron (2000) di Pulau Jawa menunjukkan bahwa selama periode 1984 hingga 1990 terdapat perubahan distribusi pendapatan per kapita rumah tangga. Perubahan tersebut terkait dengan perubahan struktur demografi, tingkat pendidikan, perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian, serta perubahan pendapatan dalam sektor ekonomi. Secara umum, terdapat pengurangan kemiskinan akibat adanya perbaikan pendapatan masyarakat yang bekerja pada sektor non pertanian, namun demikian hal tersebut berakibat pada perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor non pertanian. Pada akhirnya kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya peningkatan ketimpangan.

Isu ketimpangan antar kabupaten/kota di Kalimantan Timur terletak pada kondisi yang relatif sama dari waktu ke waktu, walaupun secara nilai indikator Indeks Williamson menunjukkan bahwa ketimpangan antar wilayah di Kalimantan Timur relatif rendah. Hal ini dapat disebabkan karena struktur ekonomi Kalimantan Timur yang relatif sama, yaitu didominasi oleh sektor Pertambangan. Bahkan, jika dikaitkan dengan penelitian Cameron, terlihat bahwa terdapat kecenderungan adanya perpindahan sumber daya dari sektor pertanian ke non pertanian. Ini ditunjukkan oleh besaran kontribusi sektor pertanian yang cenderung menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, kontribusi sektor pertanian terhadap total PDRB Kalimantan Timur adalah sebesar 8,22 persen, sedangkan pada tahun 2019 menjadi sebesar 7,92 persen.

Berdasarkan uraian di atas, maka beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan sebagai upaya dalam menurunkan ketimpangan pendapatan masyarakat di Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

1. Terkait dengan bidang pendidikan, Pemerintah telah menetapkan belanja untuk bidang pendidikan minimal 20 persen sejak tahun 2009. Belanja tersebut agar dapat digunakan untuk perbaikan sistem pendidikan, karena capaian pendidikan sangat berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan melalui kualitas SDM yang dihasilkan dari berbagai upaya pembangunan di bidang pendidikan. Oleh karena itu, belanja pendidikan yang dilakukan harus tepat sasaran untuk peningkatan kualitas layanan pendidikan yang efektif.
2. Mempermudah akses layanan pendidikan bagi masyarakat yang lebih luas. Akibat dari akses ke pendidikan yang tidak merata, juga berdampak kepada masalah ketenagakerjaan. Data SE2016 menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja adalah berada pada usaha berskala mikro kecil (UMK). Jika dibandingkan dengan usaha menengah besar (UMB), tingkat produktivitas UMK jauh lebih kecil dan hal tersebut berdampak kepada besaran pendapatan yang diterima oleh pekerja pada UMK. Perlu dilakukan kebijakan yang terintegrasi antara sektor pendidikan dan sektor ketenagakerjaan, melalui upaya penyelaraskan antara program pendidikan yang disediakan dengan kebutuhan lapangan pekerjaan di Kalimantan Timur. Dengan adanya penyesuaian tersebut, diharapkan bahwa suplai tenaga kerja yang ada di Kalimantan Timur dapat terserap dalam lapangan kerja, serta dapat lebih menjamin peroleh pendapatan yang layak bagi pekerja.
3. Tingkat kesejahteraan (*wealth*) juga berdampak terhadap ketimpangan pendapatan masyarakat. Implikasinya adalah bahwa kemampuan masyarakat untuk dapat mengakses layanan jasa keuangan, terutama dalam kaitannya untuk pembiayaan aktivitas produktif masyarakat, dapat membantu menurunkan *gap* antara si miskin dan si kaya. Perbaikan akses layanan kredit yang efisien dapat membantu masyarakat tidak mampu dalam hal pembiayaan untuk aktivitas ekonomi yang

mereka lakukan. Sehingga hal ini dapat membantu kelompok yang kurang mampu untuk tetap produktif dalam menciptakan pendapatan.

4. Hal lain yang juga penting adalah pemerataan pembangunan, khususnya penyediaan infrastruktur, antara perkotaan dan pedesaan. Walaupun secara empiris tingkat ketimpangan di pedesaan lebih rendah, namun rata-rata tingkat pendapatan masyarakat di pedesaan lebih rendah dibandingkan pendapatan masyarakat di wilayah perkotaan. Selain itu, di Kalimantan Timur tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan. Oleh karena itu, perbaikan pendapatan masyarakat di wilayah pedesaan dapat membantu mengurangi ketimpangan pendapatan masyarakat di Kalimantan Timur. Perbaikan infrastruktur juga, terutama untuk transportasi, diharapkan juga dapat menghilangkan hambatan pada jalur distribusi sehingga aktivitas ekonomi di seluruh wilayah kabupaten/kota serta di pedesaan atau perkotaan dapat lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Banerjee, A., & Duflo, E. (2003). Inequality and Growth: What Can the Data Say? *Journal of Economic Growth* Vol. 8 No. 3, 267-99.
- Berg, A., & Ostry, J. (2011). *Inequality and Unsustainable Growth: Two Side of the Same Coin? IMF Staff Discussion Note SDN/11/08*. Washington, DC: International Monetary Fund.
- Cameron, L. A. (2000). Poverty and Inequality in Java: Examining the Impact of The Changing Age, Educational and Industrial Structure. *Journal of Development Economics* 62, 149-180.
- Dabla-Norris, E., Kochhar, K., Suphaphiphat, N., Ricka, F., & Tsounta, E. (2015). *Causes and Consequences of Income Inequality: a global perspective. IMF Staff Discussion Note SDN/15/13*. Washington, DC: International Monetary Fund.
- Demunger, S., Sachs, J. D., Woo, W. T., Bao, S., Cheng, G., & Melingger, A. (2002). *Geography, Economic Policy, and Regional Development in China*. NBER Working Paper 8897.
- Jain-Chandra, S., Kinda, T., Kochhar, K., Piao, S., & Schauer, J. (2016). *Sharing the Growth Dividend: Analysis of Inequality in Asia*. Washington: IMF.
- Sjafrizal. (2012). *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Suryadarma, D., Artha, R. P., Suryahadi, A., & Sumarto, S. (2005). *A Reassessment of Inequality and Its Role in Poverty Reduction in Indonesia*. The Smeru Research Institute Working Paper.
- Suryahadi, A., Izzati, R. A., & Suryadarma, D. (2018). *The Causes and Consequences of Increasing Inequality in Indonesia: A LongTerm View*. The Smeru Research Institute Working Paper.
- Wicaksono, E., Amir, H., & Nugroho, A. (2017). *The Sources of Income Inequality in Indonesia: A Regression-Based Inequality Decomposition*. Asian Development Bank Institute Working Paper 667.
- World Bank. (2016). *Ketimpangan Yang Semakin Lebar*. Jakarta: World Bank.
- Yumna, A., Rakhmadi, M. F., Hidayat, M. F., Gultom, S. E., & Suryahadi, A. (2015). *Estimating the Impact of Inequality on Growth and Unemployment*. The Smeru Research Institute Working Paper.



BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Alamat Kantor :

Jl. Kesuma Bangsa No. 2 Samarinda 75123, Telp : 0541 - 741044

<http://bappeda.kaltimprov.go.id>